

KO PERAS DESA MERAH PUTIH

**PEDOMAN PELAKSANAAN,
PERUBAHAN DAN ALTERNATIF
PROGRAM**

Penulis

Media Wahyudi Askar - Galau D Muhammad

Bara Muhammad Setiadi - Aulia Lianasari

Jaya Darmawan - Bakhrul Fikri

Editor

Bhima Yudhistira Adhinegara

2025

Ko Peras Desa Merah Putih

Pedoman Pelaksanaan, Perubahan dan Alternatif Program

Publikasi

Juni 2025

Penerbit

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Jakarta, Indonesia

Alamat Surat Elektronik

admin@celios.co.id

Situs Web

www.celios.co.id

Hak Cipta

©2025 CELIOS

CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak.

Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penelitian mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Kami berterima kasih kepada seluruh tim penulis atas dedikasi mereka dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan merumuskan temuan-temuan yang menarik. Apresiasi juga kami berikan kepada seluruh responden yang telah memberikan pendapat, dan saran konstruktif untuk mendukung argumen dan memperdalam analisis dalam studi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi kualitas kebijakan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

Penata Desain

Mazdan Maftukha Assyayuti
Muhammad Arifin



DAFTAR ISI

- 1 | **Temuan Utama**
- 2 | **Kata Pengantar**
- 3 | **Ringkasan Eksekutif**
- 5 | **Pendahuluan**
 - 5 | Latar Belakang
 - 6 | Metodologi Penelitian
- 8 | **Koperasi Dibalut Bendera Merah Putih**
- 17 | **KopDes MP Merusak Kredibilitas dan Profitabilitas Bank Himbara**
- 25 | **Kebijakan Sentralistik: Dana Desa Dikuasai Tanpa Persetujuan Rakyat Desa**
- 35 | **KopDes MP Berpotensi Menghambat Progres Pengembangan BUMDes**
- 40 | **KopDes MP Merusak Ekosistem Usaha Desa**
- 46 | **KopDes MP Berpotensi Memicu Konflik dan Menjadi Tengkulak Baru**
- 50 | **KopDes MP Jadi Alat Konsolidasi Politik Jelang Pemilu 2029**
- 57 | **Rekomendasi Kebijakan: Membesarkan Koperasi Tanpa Merusak Desa**
 - 57 | Bank Indonesia dan OJK direkomendasikan agar segera membuat stress test dan mitigasi terhadap risiko sistemik bank BUMN akibat pembiayaan ke Kopdes MP
 - 57 | Model Pembiayaan Koperasi yang Inklusif
 - 62 | Keberpihakan Negara pada Penciptaan Pasar yang Adil untuk Koperasi
 - 67 | Koperasi Mandiri dan Inovatif
 - 74 | SDM Koperasi Harus Naik Kelas
 - 77 | Koperasi dapat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)

Daftar Tabel

13 | Tabel 1

Perbedaan Konsep Dasar Koperasi, BUMDes dan Kopdes MP

29 | Tabel 2

Risiko Fiskal Lokal

32 | Tabel 3

Asumsi Kebocoran Dana

32 | Tabel 4

Estimasi Kebocoran Dana Publik yang Mengalir ke *underground economy* Selama 10 tahun

43 | Tabel 5

Perbandingan Konsumsi Obat Antara Desa dan Kota

43 | Tabel 6

Dampak Finansial Terhadap Fasilitas Kesehatan Desa Sebelum dan Sesudah Adanya Laboratorium TNI

53 | Tabel 7

Proporsi Kursi Legislatif yang Dapat Dimenangkan Melalui Konsolidasi Kopdes MP

58 | Tabel 8

Skema Pembiayaan Pihak Ketiga, Aset Bersama, dan Partisipasi Anggota

60 | Tabel 9

Keuntungan Penerapan Pembiayaan Campuran (*blended finance*)

65 | Tabel 10

Identifikasi Masalah dan Solusi Dalam Beragam Unit Usaha Koperasi

72 | Tabel 11

Aktualisasi Fungsi, Indikator, dan Pemetaan stakeholder Pemerintah

77 | Tabel 12

Skema Kerjasama Multipihak

78 | Tabel 13

Variasi Pelatihan Kontekstual

79 | Tabel 14

Rencana Pelatihan Pembukaan Lapangan Kerja

Daftar Gambar

14 Gambar 1 Prioritas Kebutuhan Pembangunan dan Kesejahteraan di Desa	41 Gambar 13 Pengaruh Kopdes MP Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat
15 Gambar 2 Skema Potensi Reproduksi Ketimpangan Sistemik Program Koperasi Desa Merah Putih	47 Gambar 14 Kekhawatiran Publik Mengenai Konflik Dibalik Kopdes MP
18 Gambar 3 Pembiayaan Kopdes MP dengan Dana Desa	49 Gambar 15 Alur Dampak Negatif Intervensi Koperasi Desa dalam Ekosistem Pertanian
18 Gambar 4 Skema Model Bisnis Koperasi Desa Merah Putih	51 Gambar 16 Kepercayaan Publik Terkait Kepentingan Politik Kopdes MP
20 Gambar 5 Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan (% YoY)	54 Gambar 17 Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Kopdes MP
20 Gambar 6 Laju Pertumbuhan Kredit Bank Himbara ke UMKM Total dan Mikro (% YoY)	59 Gambar 18 Peta Keunggulan <i>Blended Finance</i>
21 Gambar 7 Pertumbuhan Penyaluran Kredit ke Koperasi (% YoY)	64 Gambar 19 Kolaborasi Antar Entitas Koperasi, Swasta, dan BUMN/D
22 Gambar 8 Skema Potensi Risiko Program Koperasi Desa Merah Putih	67 Gambar 20 Perbandingan Pendekatan <i>Top-Down</i> dan <i>Bottom-Up</i>
26 Gambar 9 Keleluasaan Penggunaan Dana Desa Untuk Kepentingan Masyarakat Desa	70 Gambar 21 Multi Peran Pemerintah
30 Gambar 10 Perbandingan Nilai Dana Desa dan <i>underground economy</i> Pada Periode Sebelum dan Sesudah Kopdes MP	74 Gambar 22 Inventaris Masalah Pokok yang Dihadapi Koperasi di Desa
36 Gambar 11 Perbandingan Jumlah Koperasi dan BUMDes di Jawa dan Luar Jawa	75 Gambar 23 Pemetaan Solusi Efektif dalam Pengembangan Koperasi di Desa
37 Gambar 12 Pengaruh Kopdes MP Terhadap Pengembangan BUMDes	76 Gambar 24 Analisis Gap Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa



Temuan Utama

Koperasi Desa Merah Putih

Kopdes MP Merampas Dana Desa

76%

Perangkat desa menolak Kopdes MP dibiayai dengan pinjaman Bank Himbara dengan Dana Desa sebagai sumber pembayaran cicilan.

Kepentingan Politis Dibalik Kopdes MP

35%

Perangkat desa melihat kepentingan politik menjadi alasan paling kuat dari pendirian Kopdes MP.

Otonomi Dana Desa Setengah Hati

6 dari 10

Desa tidak leluasa dalam mengalokasikan Dana Desa sesuai kepentingan masyarakat desa.

Kopdes MP Berpotensi Memicu Konflik

46%

Hampir separuh perangkat desa khawatir atas pengaruh Kopdes MP dalam memunculkan konflik dan kerentanan sosial di Desa.

Kopdes MP Berpotensi Jadi Ladang Rente dan Korupsi

65%

Mayoritas perangkat desa menilai program Kopdes MP berpotensi dikorupsi dalam pelaksanaannya.

Kopdes MP Berdiri, BUMDes Mati Suri

3 dari 10

Desa khawatir atas konsekuensi pendirian Kopdes MP yang akan mengganggu pengembangan BUMDes.

Bocor Anggaran Sana-Sini

Rp60 Juta

Estimasi besaran rerata kebocoran di setiap desa setiap tahun.

Kopdes MP Target Kursi Legislatif

34-46 Kursi

Estimasi jumlah kursi legislatif yang dapat dimenangkan ketika Kopdes MP dijadikan alat politisasi dalam pemilu

Rp420 Juta

Jumlah dana desa setiap desa untuk membayar cicilan Kopdes MP

Industri Farmasi Kian Merugi

Rp4,7 Triliun

Estimasi besaran kerugian yang ditanggung industri farmasi setiap tahunnya apabila dikelola TNI

Rp4,8 Triliun

Proporsi dari dana desa yang bocor ke *underground economy* setiap tahunnya akibat Kopdes MP.

Gelombang PHK Sektor Farmasi

174.528

Pekerja di industri farmasi swasta yang rentan di-PHK sehingga berdampak pada 195,5 juta orang yang bergantung pada akses obat-obatan apabila penyaluran obat dikelola TNI

Alternatif Pengembangan Koperasi tanpa Kopdes Merah Putih

Lapangan Pekerjaan Semakin Mendesak

36%

Kebutuhan masyarakat desa yang paling tinggi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan

Balai Latihan Kerja Jalan Keluar Pengangguran

2,8 Tahun

Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap 7,28 juta orang atau total pengangguran terbuka di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan koperasi di BLK

Efisien Menyerap Angkatan Kerja

Rp36 Triliun

Jumlah alokasi anggaran tahunan yang dibutuhkan untuk mendukung pelatihan koperasi melalui BLK.



KATA PENGANTAR

Studi ini dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar mendorong kebijakan berbasis data dalam proses pembangunan desa di Indonesia. Di tengah hingar bingar retorika pemberdayaan, kami merasa perlu membangun kesadaran publik agar program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dilakukan dengan benar, sebelum resmi dijalankan. Dengan kata lain, laporan ini adalah langkah mitigatif, bukan penghakiman. Studi ini hadir untuk mengurangi risiko kegagalan kebijakan yang bisa berdampak panjang bagi masyarakat desa.

Sebagai studi empiris, kami mengajak seluruh pembaca, terutama pengambil kebijakan, untuk membaca laporan ini dengan kepala dingin dan hati terbuka. Jangan bayangkan desa seperti kota. Jangan tempatkan bayangan sistem ekonomi berbasis “perintah” dalam ruang hidup masyarakat desa yang memiliki karakter, sejarah, dan kebutuhan yang berbeda. Terlalu banyak kebijakan nasional lahir dari obrolan politik segelintir orang, disusun oleh mereka yang belum pernah berumah dan berumput di desa dan punya kepentingan elektoral. Penelitian ini ingin menjadi jembatan agar suara dan realitas warga desa ikut terdengar dan menjadi bagian dari arsitektur kebijakan. Mereka selama ini diabaikan dalam desain penyusunan Kopdes MP. Sebagian hanya mendengar, sebagian hanya ikut saja, sebagian hanya termangu, ketika namanya disuruh masuk menjadi anggota Kopdes MP, tanpa mereka tahu apa itu Kopdes MP dan tak punya ruang signifikan bagaimana Koperasi itu dibangun.

Kami percaya, ruang evaluasi masih terbuka lebar. Jika memang niatnya adalah memperkuat ekonomi desa, maka skema Kopdes MP masih bisa diperbaiki: dari tata kelola, sumber pembiayaan, hingga aktor pelaksananya. Namun, jika ternyata kerangka dasarnya keliru, bahwa Kopdes MP ini terkesan dipaksakan, maka pembatalan bukanlah aib dan kegagalan. Justru, itu menunjukkan keberanian intelektual dan kematanagan etika bernegara. Negara yang sehat bukan negara yang anti kritik, melainkan yang mau belajar dari kesalahan dan memperbaiki langkah sebelum semuanya terlambat.

Kita tidak boleh terburu-buru. Kebijakan yang disusun tergesa-gesa hanya akan menghabiskan uang negara. Perlu diingat, ratusan triliun uang pajak rakyat dipertaruhkan untuk kebijakan ini. Jangan sampai ketika ratusan triliun sudah hilang, kita baru tersadar dan berteriak bahwa kebijakan ini gagal. Desa bukan ruang percobaan, dan warga desa juga bukan objek kebijakan yang bisa didorong-dorong sesuka hati oleh ambisi kekuasaan.

Kami mendorong siapapun yang membaca laporan ini, baik perangkat desa, akademisi, mahasiswa, warga desa, maupun warga kota, untuk ikut menyebarkan, mendiskusikan, dan bahkan memerdebatkan isinya. Dari proses wawancara ratusan jam yang kami lakukan, kami mendengar dan merasakan banyak sekali ketakutan perangkat desa untuk menyuarakan aspirasinya. Suara kritis bukanlah bentuk permusuhan, tapi wujud tanggung jawab kita bersama agar setiap program negara benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Program yang dipertanyakan dan diperdebatkan jauh lebih sehat daripada yang diterima mentah-mentah tanpa telaah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan studi ini, terutama kepada para kepala desa dan warga yang telah berbagi cerita, data, dan pandangan secara jujur dan tulus. Semoga laporan ini memberi sumbangsih bermakna bagi pembentukan kebijakan pembangunan desa yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

Salam hangat,
Tim Penulis, Peneliti CELIOS



RINGKASAN EKSEKUTIF

Di tengah hiruk pikuk pembangunan desa, pendirian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) tampak menjanjikan perubahan besar dalam pemberdayaan ekonomi desa. Dengan membawa nama “merah putih” melambangkan semangat nasionalisme, program ini seolah menjadi angin segar untuk mengatasi beragam persoalan di desa. Akan tetapi, di balik retorika heroik tersebut, penelitian ini menyingkap təbir kompleksitas dan pertaruhan masa depan ekonomi pedesaan yang jauh lebih dalam dari sekadar kata “koperasi”.

Melalui data primer dan analisis empiris, studi ini mengevaluasi bagaimana Kopdes MP dipersepsikan di tingkat akar rumput, serta bagaimana potensi dampaknya bagi perekonomian desa. Data lapangan justru menunjukkan bahwa semangat pemberdayaan yang dikibarkan malah berpotensi menjerumuskan desa ke dalam belitan baru antara birokrasi, rente, dan agenda politik elektoral terselubung. Banyak kepala desa bersuara menolak dengan lantang, tapi juga tidak sedikit yang memilih diam dan menerima - kalau melawan angin ribut, patah semua ranting.

Pelemahan Otonomi dan Potensi Rente

Studi ini menemukan sebanyak 76% perangkat desa menyuarakan penolakan terhadap skema pembiayaan Kopdes MP melalui pinjaman Bank Himbara, yang cicilannya dibebankan pada Dana Desa. Ini menjadi cerminan keresahan atas menyempitnya ruang gerak desa dalam mengelola sumber daya keuangan yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, 65% responden mengindikasikan adanya celah besar dalam tata kelola Kopdes MP yang rentan disusupi praktik korupsi terselubung, menguatkan dugaan bahwa program ini berpotensi menjadi ladang subur bagi rente struktural.

Konflik Kepentingan dan Ancaman terhadap Kelembagaan Desa

Sebanyak 35% perangkat desa mencium aroma kepentingan politik dalam pendirian Kopdes MP, dan hampir setengahnya (46%) mengkhawatirkan potensi konflik dan ketegangan sosial yang bisa terjadi akibat Kopdes MP ini. Ketika Kopdes MP hadir, BUMDes justru terpinggirkan, bahkan mati suri, menimbulkan pertanyaan: apakah yang sedang dibangun adalah kemandirian desa, atau justru sebuah struktur kuasa baru.

Risiko Kebocoran Dana dan Efek Makroekonomi

Estimasi menunjukkan bahwa setiap desa mengalami kebocoran anggaran hingga Rp60 juta per tahun, sementara 12,8% dari dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan selama satu dekade dinilai berisiko bocor. Artinya, terjadi pergeseran penggunaan dana desa ke arah Kopdes MP dan mengabaikan kebutuhan desa lainnya yang sebetulnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa. Tak hanya itu, 6,8% dari dana tersebut berpotensi mengalir ke sektor ekonomi bawah tanah (*underground economy*) setiap tahunnya, memperlihatkan sisi gelap dari pengelolaan dana publik yang minim transparansi.

Instrumentalisasi Politik dan Ancaman terhadap Sektor Strategis

Temuān studi ini juga menyiratkan bahwa Kopdes MP dapat dimobilisasi sebagai kendaraan politik. Potensi pengaruhnya dalam pemilu disebut mampu mengamankan 34–46 kursi legislatif, sebuah angka yang mencerminkan kekuatan politik berbasis akar rumput yang terkonsolidasi. Di sisi lain, pengelolaan distribusi obat oleh institusi non-sipil seperti TNI diprediksi dapat menimbulkan kerugian di sektor industri farmasi swasta hingga Rp4 triliun per tahun dan ancaman PHK terhadap 174.528 pekerja, yang secara domino akan berdampak pada 195,5 juta orang yang bergantung pada akses obat-obatan..

Kebutuhan Mendesak: Lapangan Kerja dan BLK sebagai Solusi Alternatif

Di antara berbagai wacana besar tersebut, suara masyarakat desa tetap sama: lapangan kerja adalah kebutuhan paling mendesak (36%). Melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), solusi yang lebih tepat sasaran dapat diwujudkan. Dengan anggaran Rp36 triliun per tahun, pelatihan koperasi dan pembukaan pasar untuk koperasi mampu menyerap hingga 7,28 juta pengangguran dalam waktu 2,8 tahun, menawarkan jalan keluar yang lebih konkret daripada proyek koperasi yang sarat kepentingan.

Dari berbagai fakta dan temuan lapangan, terlihat bahwa Kopdes MP bukan sekadar program pembangunan, melainkan cerminan dari persimpangan antara niat baik dan kepentingan tersembunyi.

Studi ini hadir sebelum Kopdes MP diresmikan. Berharap ada evaluasi strategis, agar tidak menjadikan desa sebagai panggung politik, dan memeras Dana Desa untuk celengan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian luar biasa dalam mengarahkan kapal besar bernama pembangunan desa ini agar tidak karam oleh badi korupsi dan intrik politik yang dibungkus jargon pemberdayaan.

Penelitian ini merekomendasikan adanya penataan ulang skema pemberdayaan desa berbasis koperasi, diversifikasi pembiayaan koperasi, mendorong solusi pengembangan koperasi yang lebih tepat sasaran, serta menekankan pada partisipasi otentik warga, dan transparansi anggaran. Hanya dengan jalur itu, desa dapat benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, bukan menjadi kepanjangan tangan dari ambisi segelintir elite dengan selimut merah putih.



PENDAHULUAN

Latar belakang

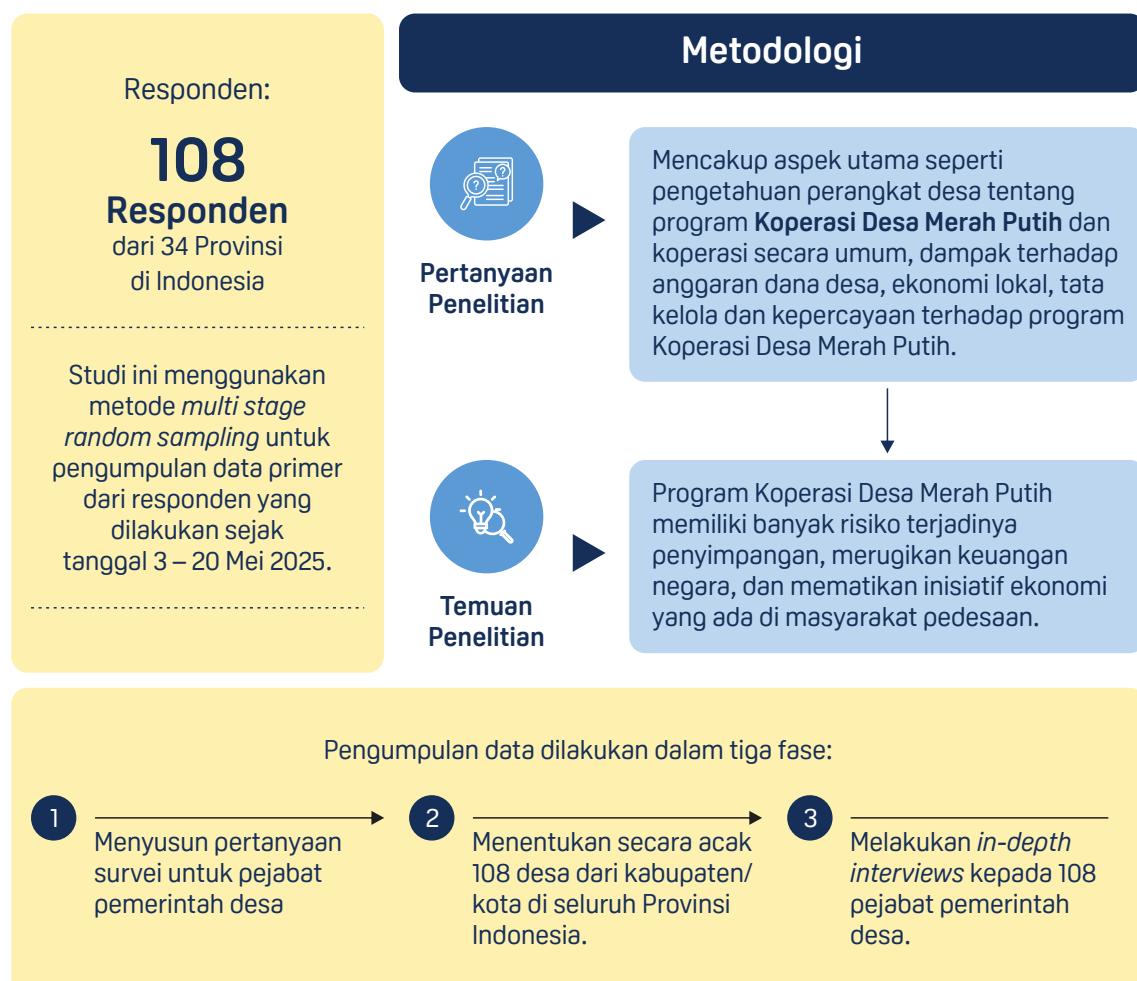
Pembangunan desa diharapkan bisa memperkecil ketimpangan antar wilayah, serta menciptakan kemandirian ekonomi. Sudah banyak kebijakan pembangunan dengan narasi ekonomi kerakyatan berbasis desa, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Program ini diperkenalkan pemerintah Prabowo-Gibran dengan narasi besar tentang nasionalisme ekonomi. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah kehadiran Kopdes MP benar-benar datang dari keinginan masyarakat dan menjawab kebutuhan riil orang-orang desa, atau justru mereproduksi pendekatan top-down dan mengorbankan sumber daya desa?

Saat ini, sebagian besar desa di Indonesia berhadapan dengan persoalan struktural seperti keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, rendahnya kapasitas usaha lokal, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat, serta minimnya kewenangan desa untuk mengelola dana desa secara independen.

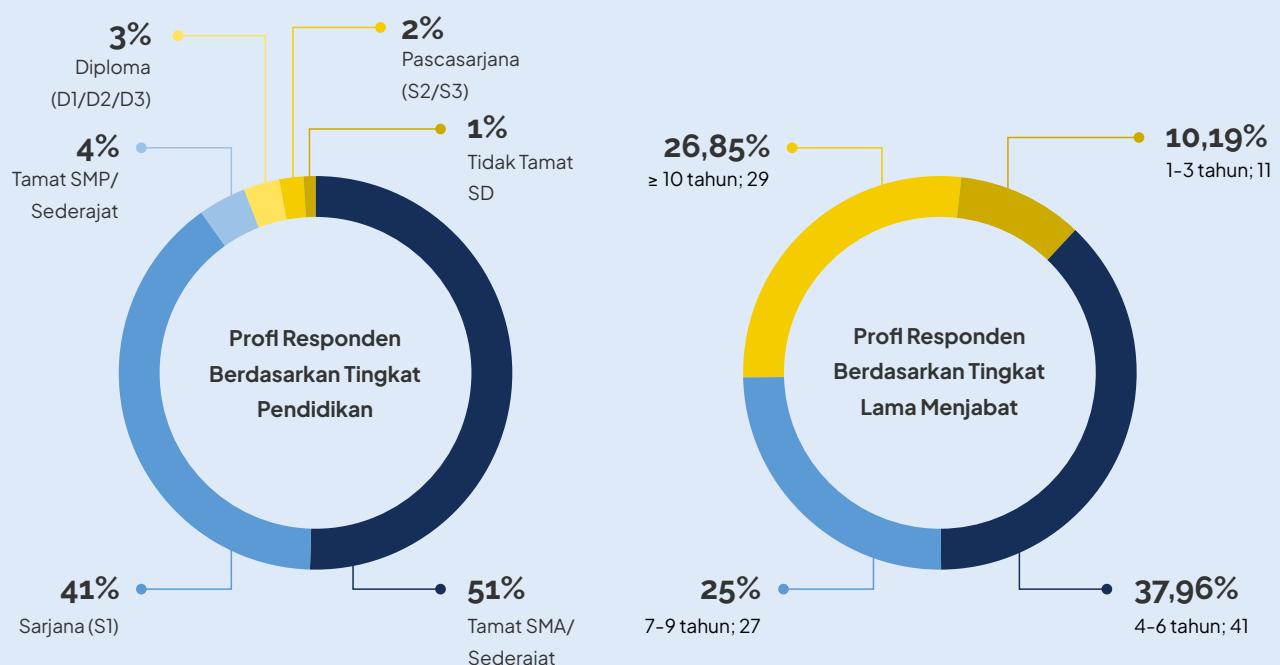
Studi ini disusun untuk memahami secara mendalam posisi, peran, dan implikasi kelembagaan KopDes MP serta mengevaluasi apakah model koperasi yang diusulkan mampu memperkuat ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan, atau malah memperlemah otonomi desa melalui skema yang sarat kepentingan eksternal.

Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik pengumpulan data utama. Sampel dipilih secara acak pada setiap tahapannya menggunakan metode *multistage random sampling*. Tahap pertama dilakukan dengan memilih kabupaten/kota secara acak dari seluruh provinsi di Indonesia. Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan memilih desa secara acak di dalam kabupaten/kota yang terpilih. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili setiap desa yang ada di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir bias dalam pengambilan sampel. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 108 orang dari desa yang berbeda dan merupakan pejabat pemerintah desa karena program Koperasi Desa Merah Putih akan dilaksanakan di tingkat desa. Metode survei dilakukan dengan cara *in-depth interview* untuk menggali pandangan dari pihak yang memiliki keterkaitan langsung terhadap isu yang diteliti. Untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta privasi para responden, peneliti menerapkan prinsip anonimitas. Nama, jabatan, atau informasi lain yang dapat mengarah pada identitas pribadi responden tidak dicantumkan sebagai bagian dari komitmen peneliti terhadap etika penelitian.



Persebaran Responden Berdasarkan Provinsi





KOPERASI DIBALUT BENDERA MERAH PUTIH

Koperasi bukan konsep baru dalam lanskap ekonomi Indonesia. Sebagai entitas ekonomi yang menjunjung tinggi gotong royong, banyak kisah sukses koperasi dalam sejarah perekonomian Indonesia. Esensinya jelas, koperasi menantang paradigm kepemilikan individu dalam sistem ekonomi konvensional, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Koperasi menawarkan alternatif yang berpihak pada solidaritas, bukan sekedar menghimpun modal.



Dari anggota

Sumber daya koperasi, baik modal, tenaga, maupun gagasan berasal dari partisipasi aktif anggotanya. Koperasi bukanlah entitas yang didanai oleh investor luar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi dibangun atas dasar solidaritas



Oleh anggota

Pengelolaan koperasi dilakukan oleh anggota sendiri melalui mekanisme demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang setara, tanpa memandang besarnya kontribusi modal.



Untuk anggota

Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan koperasi dikembalikan kepada anggota, bukan kepada pemilik modal eksternal. Surplus atau sisa hasil usaha koperasi dibagikan kembali secara adil berdasarkan partisipasi ekonomi, bukan berdasarkan kepemilikan saham.

Prinsip koperasi¹

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- Kemandirian;
- Pendidikan perkoperasian;
- Kerjasama antar koperasi.

¹ Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992> (Diakses Pada 8 Mei 2025).

Koperasi tidak hanya menawarkan alternatif kepemilikan, tetapi juga menantang struktur hierarkis, menghadirkan tata kelola partisipatif, dan skema pengawasan berbasis komunitas. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, yakni alat untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi melalui nilai kebersamaan, keadilan, dan pengendalian ekonomi oleh masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, prinsip itu tak pernah benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Sejarah menunjukkan bahwa justru negara—melalui regulasi *top-down* dan intervensi politik, yang kerap menghambat perkembangan koperasi. Sejak era kolonial hingga pasca-kemerdekaan, negara sering kali menggunakan koperasi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu. Infiltrasi negara membajak semangat kolektif koperasi, menjadikannya sekadar perpanjangan tangan kebijakan, bukan wadah perjuangan rakyat.



Kopdes MP ini besarnya kepentingan politik. kepentingan elitenya itu terasa dengan banyaknya kementerian yang dilibatkan. Sementara kami di bawah hanya bisa menerima.

Perangkat Desa di Nusa Tenggara Barat

Alih-alih memperkuat koperasi sebagai entitas ekonomi yang tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 justru mencerminkan kemunduran kelembagaan koperasi. Kopdes MP dibentuk dengan pendekatan *top-down*, menempatkan koperasi bukan sebagai alat kedaulatan ekonomi warga, melainkan sebagai agregator layanan negara—mengelola pembiayaan, menyalurkan subsidi, hingga memegang kendali atas aset publik dan sosial. Ruang inovasi berbasis komunitas nyaris absen dalam skema ini.

Ide pembentukan koperasi desa merah putih yang dikontrol penuh oleh negara seperti ini bukanlah langkah maju, melainkan replikasi masa lalu yang gagal, di mana koperasi kehilangan jiwanya sebagai penggerak ekonomi rakyat yang otonom dan inovatif.

Kopdes MP dibentuk secara *top-down* oleh pemerintah pusat dan terikat dengan program pembangunan secara sektoral. Konsekuensinya, koperasi akan kehilangan esensi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis partisipasi aktif anggota. Kopdes MP tidak memenuhi konsep dasar koperasi dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, dimana konsep dasar koperasi yaitu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan², dimana dasar pendirian koperasi seharusnya *self help and cooperation*, suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama³.



Program baru karena pimpinan baru, tampil beda aja padahal isinya sama. Biar keliatan pintarnya saja.

Perangkat Desa di Kalimantan Tengah

² Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2022/09/UU-Nomor-17-Tahun-2012_ttg-Koperasi.pdf (Diakses Pada 8 Mei 2025).

³ Yuskar. 2006. Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi: Potret Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Datang, Padang. <http://repo.unand.ac.id/4760/1/Bung%20Hatta%20Eko%20Ker%20%26%20Koperasi%2C%20%20Buku%20Kecil%2C.pdf> (Diakses Pada 8 Mei 2025).

Pola ini mengingatkan pada praktik koperasi era Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1959, yang menekankan pembentukan koperasi konsumsi secara massal dan seragam oleh negara. Kala itu, koperasi tidak tumbuh secara organik dari kebutuhan masyarakat, tetapi dibentuk sebagai pelaksana kebijakan ekonomi negara. Implikasinya adalah banyak koperasi tidak sehat, hanya menjadi *administrative shells* yang tidak memiliki daya tahan ketika intervensi pemerintah berhenti.

“

Pendidikan masih kurang sehingga kemampuan pengelola kurang. Sosialisasi tentang koperasi masih kurang, masyarakat belum mengetahui. Tidak ada infrastruktur sama sekali untuk koperasi.

Perangkat Desa di Sulawesi Utara

Kondisi ini berubah pasca reformasi, lewat Inpres No. 18 Tahun 1998, yang membuka kebebasan masyarakat untuk membentuk koperasi tanpa harus bergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Kebijakan ini memberi peluang bagi koperasi untuk membangun model usaha baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan anggotanya.

“

Kalau bukan politis, Kopdes MP ini sebenarnya apa? kan serupa dengan BUMDes. Justru malah menimbulkan ketimpangan ketika BUMDes yang sudah ada disisihkan pembiayaannya sedangkan Kopdes MP dibiayai besar-besaran baik dari pusat, pinjaman bank, dan dana desa.

Perangkat Desa di Bali

Namun, Prabowo-Gibran justru menghidupkan kembali pola koperasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak masa transisi pasca-reformasi. Dengan membawa bendera nasionalisme administratif dan melibatkan berbagai kementerian serta dana publik (termasuk penggunaan Dana Desa, APBD, KUR, hingga BUMN sebagai penjamin aset), Kopdes MP berisiko menjadi lembaga birokratis yang jauh dari prinsip koperasi sejati—yakni dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.



APA ITU KOPDES MP?

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) merupakan program pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit di Indonesia. Program ini dibentuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025⁴.

Skema pembentukan Kopdes MP memang terkesan sangat demokratis dengan aturan pembentukan melalui musyawarah desa. Seolah memberikan masyarakat desa keleluasaan untuk membentuk struktur kepengurusan koperasi. Namun, seluruh format organisasi Kopdes MP, manajemen operasional, jenis usaha, hingga mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban sudah ditentukan secara seragam dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih⁵. Alih-alih menjadi manifestasi ekonomi kerakyatan, pembentukan Kopdes MP justru mencerminkan gejala etatistikasi koperasi⁶.

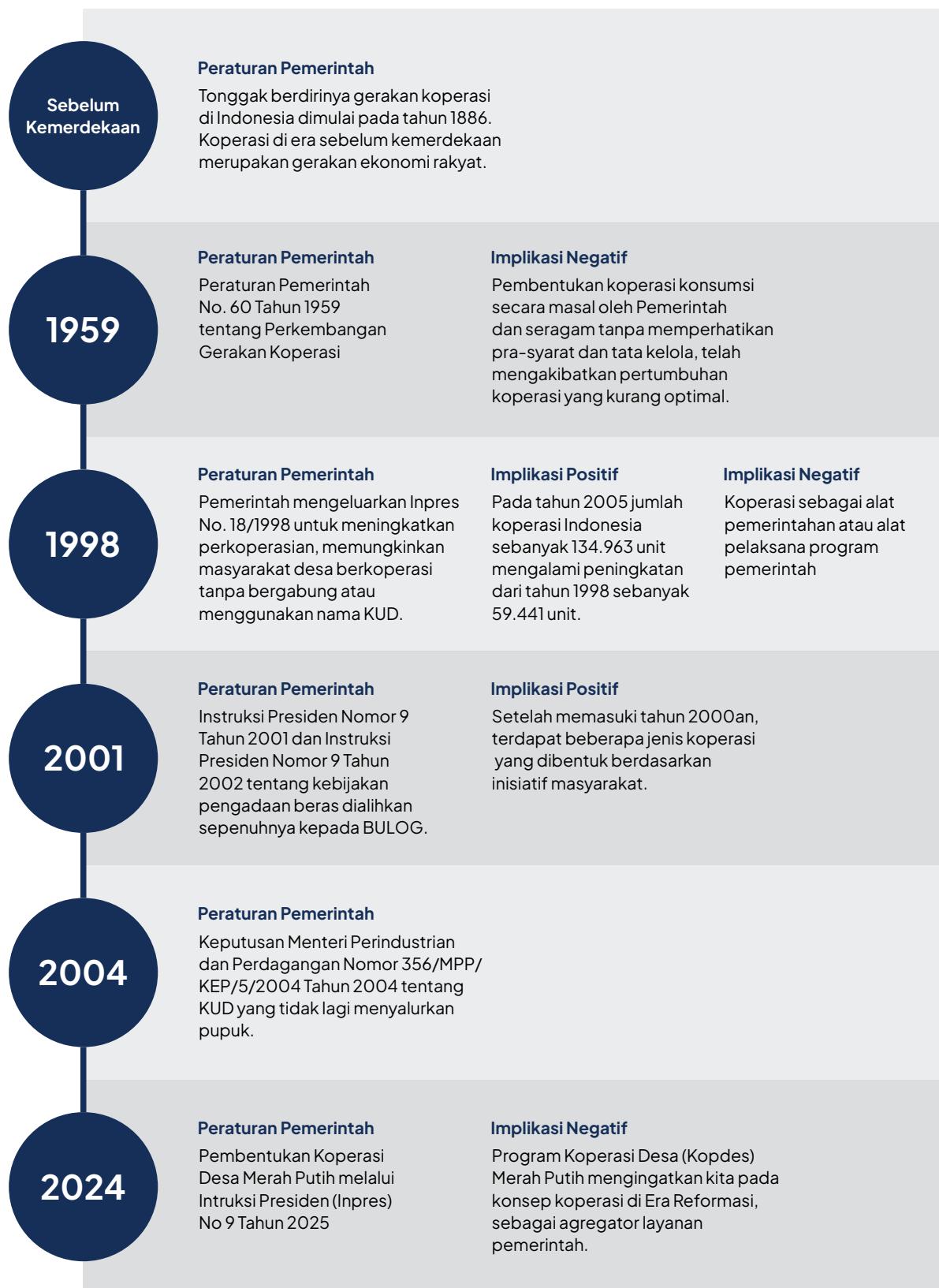
Koperasi yang dibentuk melalui instruksi dan cetak biru pusat lebih rentan gagal memenuhi kebutuhan kontekstual warga desa karena tidak berakar pada praktik lokal dan pengetahuan komunitas.

4 Kementerian Sekretariat Negara. 2025. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta. <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20Inpres%20Nomor%209%20Tahun%202025.pdf> (Diakses Pada 8 Mei 2025).

5 Menteri Koperasi. 2025. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta. <https://storage.googleapis.com/KopDes-merah-putih/regulations/11.%20Petunjuk%20Pelaksanaan%20KopDes%20Merah%20Putih%20Paraf%20%26%20TTD%20Menteri%20Koperasi.pdf> (Diakses Pada 8 Mei 2025).

6 Kecenderungan negara melakukan intervensi secara dominan terhadap struktur dan dinamika kelembagaan ekonomi rakyat.

Timeline Koperasi



Tabel 1.
Perbedaan Konsep Dasar Koperasi, BUMDes dan Kopdes MP (Prabowo)

Aspek	Koperasi "Hatta"	Koperasi Desa Merah Putih (Prabowo)	BUMDes
Asal-usul dan Desain Kelembagaan	Tumbuh dari kebutuhan lokal anggota (bottom-up)	Dirancang oleh negara (top-down) ⁷	Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat ⁸
Kepemilikan dan Kendali	Dikelola secara demokratis oleh anggota	Potensi kendali dari negara atau aktor elite politik	Pengurus sebagai pelaksana operasional yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa
Keanggotaan	Sukarela dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat	Berbasis desa, dengan keanggotaan diarahkan kepada warga desa tertentu, lebih tertutup	Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat
Partisipasi Ekonomi	Anggota menyertai modal dan mendapat SHU berdasarkan partisipasi	Pembiayaan dan modal awal sebagian besar berasal dari negara (termasuk dana desa), bukan dari kontribusi anggota	Sumber utama pembiayaan dari penyertaan modal Dana Desa
Kemandirian Jangka Panjang	Tinggi, karena tumbuh dari internal koperasi	Diragukan, karena ketergantungan tinggi terhadap dukungan eksternal	Tinggi, karena berorientasi pada imbal hasil usaha yang mampu membiayai kebutuhan operasionalnya
Pendidikan dan Informasi	Koperasi menyediakan pelatihan kepada anggotanya	Kemungkinan besar pelatihan bersifat teknokratik dari pusat	Pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah dan pusat
Kepedulian terhadap Komunitas	Prioritas pada pembangunan komunitas secara partisipatif	Fokus utama Kopdes MP adalah pada peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional, dengan pendekatan pembangunan desa terpusat	Orientasi pada peningkatan perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PADes)
Sumber Pembiayaan	Modal anggota, pinjaman koperasi, dan SHU	Dibiayai negara melalui BUMN, Kementerian Pertahanan, atau dana desa khusus	Dibiayai negara melalui Dana Desa
Risiko Keuangan	Ditanggung oleh anggota (<i>shared risk</i>), tergantung performa koperasi	Ditanggung negara jika koperasi gagal, potensi moral hazard	Ditanggung oleh pemerintah desa jika tidak produktif mendorong pendapatan desa
Pertanggung jawaban Keuangan	Akuntabilitas langsung ke anggota dalam rapat tahunan (RAT)	Pertanggungjawaban lebih kepada pemerintah atau elite birokrasi, bukan ke anggota koperasi	Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa
Insentif Efisiensi dan Inovasi	Tinggi, karena bergantung pada keberhasilan usaha anggota sendiri	Rendah, karena ada insentif moral hazard bila dana negara terus mengalir tanpa evaluasi dampak	Tinggi, karena bergantung pada produktivitas hasil usaha mandiri di desa

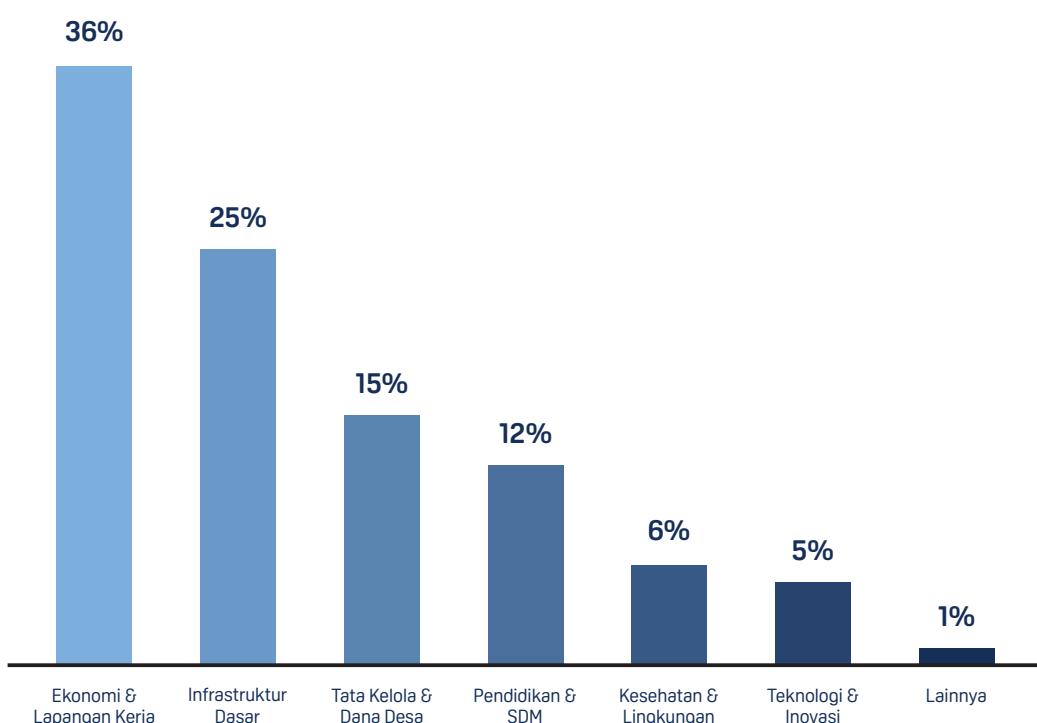
⁷ Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

⁸ Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015.

Hasil survei menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat desa sangat nyata dan berkaitan dengan persoalan yang telah lama mereka hadapi. Meskipun jawaban responden bervariasi, semuanya mengerucut pada tiga prioritas utama. Pertama, 25% responden menjawab infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, sekolah hingga SMA, akses internet, dan irigasi pertanian masih sangat dibutuhkan. Kedua, 36% responden menekankan bahwa masyarakat lebih membutuhkan dukungan langsung terhadap ekonomi lokal, seperti penyediaan alat pertanian modern, jaminan harga hasil panen, dan penguatan BUMDes agar desa bisa mengembangkan potensi dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, 15% responden menjawab masyarakat desa akan lebih terbantu apabila pemanfaatan dana desa dapat diarahkan pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan, termasuk infrastruktur yang mendukung produktivitas dan program pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pembangunan yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan kata lain, dibandingkan dengan program seperti Koperasi Desa (Kopdes) yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan utama warga, masyarakat desa lebih mengharapkan pemenuhan prioritas yang konkret dan langsung dirasakan, seperti infrastruktur dasar, dukungan untuk ekonomi lokal, dan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran.

Gambar 1.
Prioritas Kebutuhan Pembangunan dan Kesejahteraan di Desa



Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, “Apa menurut Anda yang paling diperlukan oleh desa saat ini dan seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa?” Opsi jawaban meliputi “Infrastruktur Desa”, “Ekonomi & Lapangan Kerja”, “Pendidikan & SDM”, “Tata Kelola & Dana Desa”, “Kesehatan & Lingkungan”, “Teknologi & Inovasi”, dan “Lainnya”.

Gambar 2.
Skema Potensi Reproduksi Ketimpangan Sistemik Program Koperasi Desa Merah Putih



Sumber: Analisis Celios, 2025

Program Kopdes MP juga berpotensi mereproduksi ketimpangan sistemik yang terjadi di desa. Musyawarah desa hanya akan dijadikan ajang formalitas belaka sehingga elite lokal yang akan mendominasi model bisnis Kopdes MP. Skema semacam ini persis seperti koperasi unit desa (KUD) pada masa orde baru, dibentuk melalui instruksi pusat, diberi tugas menjalankan program pemerintah untuk mendistribusikan program pupuk bersubsidi, benih, dan hasil pertanian⁹. Ketika fasilitas pemerintah ini dicabut melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 banyak KUD yang mengalami kegagalan hingga terjerat kredit macet dan kasus korupsi¹⁰.

Sama halnya dengan Kopdes MP, konsep KUD juga tidak berangkat dari kebutuhan lokal masyarakat desa, operasional organisasi hingga model bisnis sudah diatur oleh pemerintah pusat. Disisi lain, program koperasi model *top-down* ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Desa¹¹, dimana pemerintah desa yang seharusnya memegang kendali penuh atas pembangunan desa justru dipaksa mengikuti aturan pemerintah pusat.

⁹ Tempo. 2025. Mengapa KUD Gagal Berkembang di Masa Orde Baru. Majalah Tempo Edisi 27 April 2025. Jakarta. https://www.tempo.co/arsip/kud-gagal-orde-baru-1266741?n_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbiI6ImNkOWMxOWQwNTI2NmExNzQwMmMzYjA4MTIiMTU0Mjg2In0.oDuLPd44nOclnoXb5ZFZu6G8uDv40V9LAbXmHMQw7X0 (Diakses Pada 9 Mei 2025).

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia. 1998. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Jakarta. <https://bphn.go.id/data/documents/98ip018.pdf> (Diakses Pada 9 Mei 2025).

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> (Diakses Pada 9 Mei 2025).

“

Saya keberatan apabila modal Kopdes MP ini diambil dari dana desa. Dana desa kami saja sudah turun hingga pembangunan terhenti disini (Papua). Pembangunan jalan penghubung antar desa saja belum ada, bagaimana janji kesejahteraan masih kami percaya? Kami di Papua tidak habis pikir ini.”

(Perangkat Desa di Papua Barat Daya)

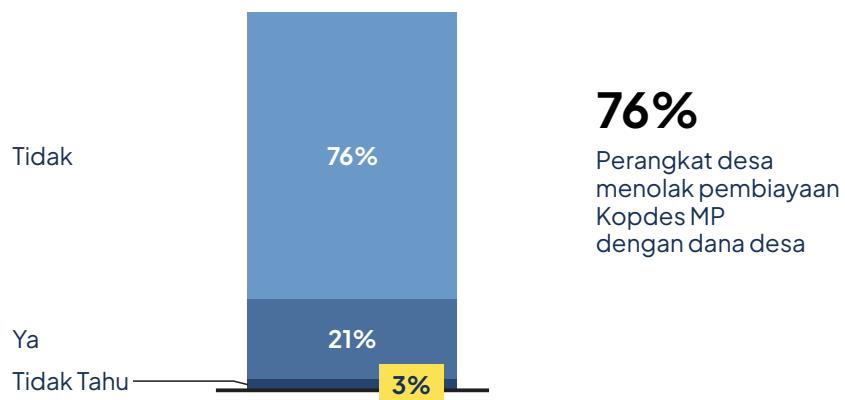


KOPDES MP MERUSAK KREDIBILITAS DAN PROFITABILITAS BANK HIMBARA

*76 persen Perangkat Desa di Indonesia tidak setuju
Kopdes MP dibiayai dengan skema pembiayaan
Kopdes MP yang berasal dari pinjaman Himbara
dengan Dana Desa sebagai sumber pembayaran cicilan.*

Studi ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa sangat khawatir terhadap keberlanjutan fiskal dan risiko kredit yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Penggunaan Dana Desa sebagai sumber pembayaran cicilan utang koperasi berisiko mengganggu fungsi alokasi dan stabilitas anggaran desa, terutama ketika koperasi gagal menjalankan usaha produktif.

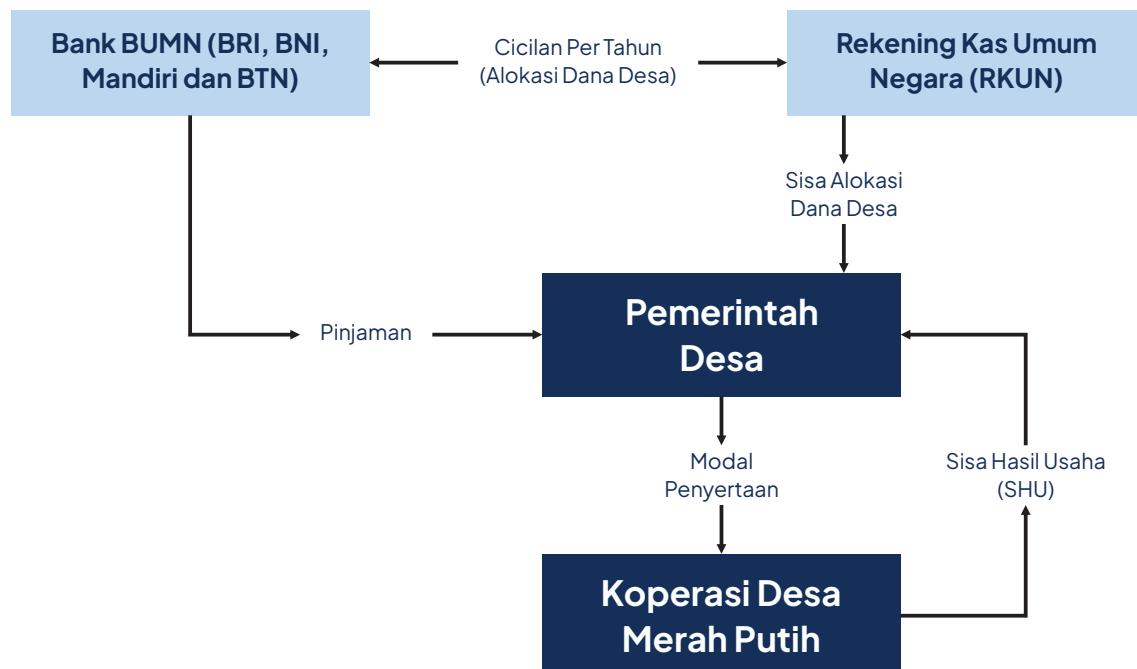
Gambar 3.
Pembayaran Kopdes MP dengan Dana Desa



Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, "Apakah Anda setuju dengan skema pemberian pinjaman kepada Kopdes Merah Putih, yang kemudian hutang tersebut harus dibayarkan dengan dana desa?". Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak Tahu".

Kopdes MP akan dibiayai menggunakan skema pinjaman dari bank Himbara dengan jaminan APBN. Pertama Himbara akan transfer dana kepada pemerintah desa setelah melakukan uji kelayakan atau *feasibility study*. Kemudian, pemerintah desa akan mencairkan dana dalam bentuk modal penyertaan kepada Kopdes MP. Sisa hasil usaha Kopdes MP akan di transfer ke rekening pemerintah desa.

Gambar 4.
Skema Model Bisnis Koperasi Desa Merah Putih



Sumber: Presentasi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 6 Maret 2025 (diolah)¹²

12 Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 2025. Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes MP. <https://kecpulautigabarat.natunakab.go.id/KopDesmerahputih/Dana%20Desa%20dan%20Koperasi%20Desa%20Merah%20Putih.pdf> (Diakses Pada 8 Mei 2025).

Rencana pemerintah menggunakan skema kredit dari Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) untuk membiayai pelaksanaan Kopdes MP berpotensi menimbulkan distorsi yang mengancam stabilitas sistem keuangan negara. Dana Desa akan dipotong secara langsung oleh pemerintah pusat dan dialihkan untuk membayar cicilan kredit Kopdes MP kepada Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN).



Tuntutan kami sederhana supaya program titipan pusat itu harus juga diikuti dengan anggarannya. jangan malah menggerus dana desa.

Perangkat Desa di Nusa Tenggara Barat

Pemerintah desa dipaksa membentuk Kopdes MP dengan cara utang ke Bank sebesar Rp3 miliar dengan tenor pengembalian selama 10 tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai agunan¹³.

Lebih parah, cicilan utang ini dibayar bukan dari keuntungan koperasi secara langsung, melainkan dari pemotongan Dana Desa yang semestinya dialokasikan untuk ketahanan pangan¹⁴. Artinya selama masa pelunasan utang, kemampuan fiskal pemerintah desa akan berkurang karena sebagian Dana Desa dipotong untuk membayar cicilan kredit koperasi. Implikasinya akan terjadi *trade off* anggaran antara program prioritas seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana dasar dengan Kopdes MP.



Kami memang diberikan uang dari pusat, tetapi sekaligus kami ditekan.

Perangkat Desa di Jawa Timur

Implikasinya dua: pertama, fungsi Dana Desa sebagai instrumen fiskal yang fleksibel untuk mendanai kebutuhan pembangunan lokal terganggu. Kedua, pemerintah desa dipaksa menanggung risiko pembiayaan tanpa memiliki kontrol penuh terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Kopdes MP justru menempatkan desa dalam posisi subordinat terhadap skema utang nasional.

Disisi lain, Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) saat ini menghadapi tekanan berat: simpanan masyarakat menurun, rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) meningkat di sektor produktif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terakhir menunjukkan NPL meningkat dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,17% pada Maret 2025, sementara *Loan at Risk* meningkat menjadi 9,86% pada Maret 2025 dari 9,28% pada Desember tahun lalu¹⁵. Ini menandakan bahwa hampir 1 dari 10 pinjaman berada dalam status rawan gagal bayar. Skema pembiayaan Kopdes MP ini membuka ruang konflik kepentingan yang serius dan menyamarkan risiko sistemik di balik jargon “pemberdayaan desa”.

Pemerintah desa diposisikan tidak sebagai aktor ekonomi yang merdeka, tetapi sebagai debitur institusional yang bertanggung jawab atas kebijakan pusat yang tidak mereka rancang.

¹³ Kompas.com, 2025. Menteri Koperasi Usul Bunga Pinjaman KopDes 3 Persen, Tenor 10 Tahun. Jakarta. <https://money.kompas.com/read/2025/05/27/083619926/menteri-koperasi-usul-bunga-pinjaman-kopdes-3-persen-tenor-10-tahun> (Diakses Pada 29 Mei 2025)

¹⁴ Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 2025. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta. <https://storage.googleapis.com/KopDes-merah-putih/regulations/8.20SE%20Menteri%20Desa%20dan%20PDT%20Nomor%206%20Tahun%202025%20tentang%20Juknis%20Percepatan%20Pelaksanaan%20Pembentukan%20KopDes%20Merah%20Putih.pdf> (Diakses pada 8 Mei 2025).

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 2025. Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Dinamika Global. Jakarta. <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-April-2025.aspx> (Diakses Pada 25 Mei 2025)

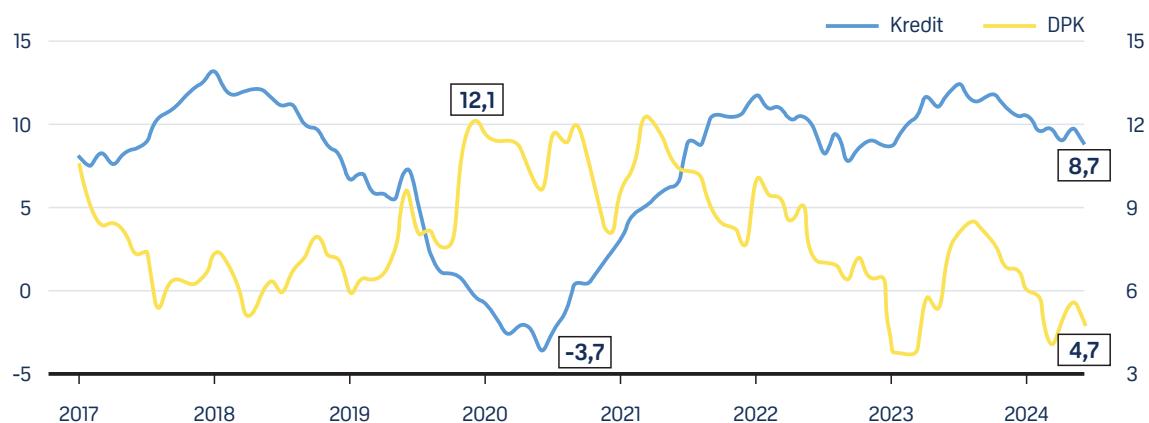
Bank Himbara harus putar otak memitigasi risiko kacaunya pembiayaan Kopdes MP

Trend pertumbuhan kredit Himbara ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mikro justru mengalami penurunan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Memperkuat indikasi bahwa terjadi perlambatan aktivitas ekonomi riil masyarakat yang sedang lesu dan tidak menyerap pembiayaan, terutama pada sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Memaksa bank-bank ini menyalurkan kredit ke koperasi desa baru yang belum memiliki rekam jejak aktivitas bisnis dan kelembagaan sama saja menambah risiko ancaman terhadap stabilitas sektor keuangan Himbara dan berimplikasi kepada perekonomian secara makro.

Skema ini secara tidak langsung memperlebar potensi instabilitas sektor keuangan nasional: memperbesar eksposur kredit kepada entitas berisiko tinggi, mendorong ekspansi kredit tanpa basis ekonomi produktif, dan menjadikan APBN sebagai tameng dari kegagalan pasar. Jika dibiarkan, skema ini tidak hanya merugikan desa, tapi juga berimplikasi terhadap ketahanan sistem keuangan dan ekonomi makro secara keseluruhan.

Gambar 5.
Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan (% YoY)



Sumber: CEIC, Bank Indonesia 2025 (diolah)

Gambar 6.
Laju Pertumbuhan Kredit Bank Himbara ke UMKM Total dan Mikro (% YoY)



Sumber: CEIC, Bank Indonesia 2025 (diolah)

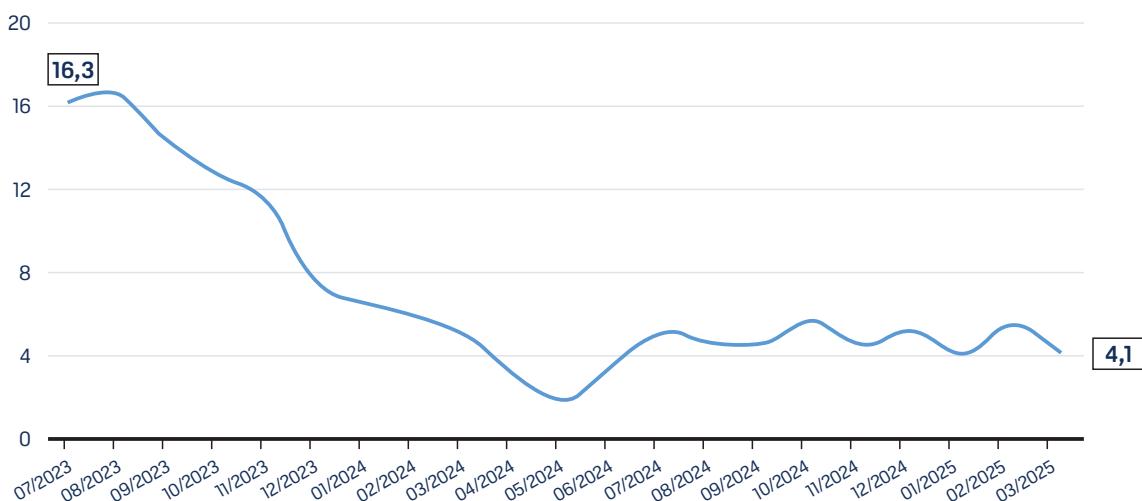
Disamping itu, tren pertumbuhan penyaluran kredit ke koperasi juga mengalami penurunan signifikan secara tahunan dari 16,3% sejak Juli 2023 menjadi hanya 4,1% pada Maret 2025. Mengindikasikan bahwa sektor koperasi belum menjadi entitas bisnis yang layak secara kredit atau tidak *bankable*, sehingga mendorong perbankan untuk menahan ekspansi kredit ke sektor koperasi. Suku bunga kredit untuk program ini sangat mungkin ditetapkan secara artifisial rendah demi menjaga narasi populis pro-ekonomi kerakyatan. Namun, suku bunga rendah dengan risiko tinggi akan membebani margin keuntungan dan likuiditas bank. Dalam jangka panjang, jika performa Kopdes MP bermasalah maka akan terjadi masalah gagal bayar secara masif menyebabkan rasio NPL meningkat serta reputasi Himbara akan menurun.

Risiko ini bukan spekulatif tanpa alasan. Per Maret 2025, rasio NPL koperasi telah mencapai 8,5%, jauh di atas rata-rata sektor perbankan. Artinya, kredit ke koperasi secara struktural jauh lebih berisiko dan sulit dikelola. Jika skenario terburuk terjadi, Himbara akan menghadapi krisis likuiditas yang tidak hanya mengguncang stabilitas internal bank, tetapi juga bisa merambat ke sektor keuangan nasional secara sistemik.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah mau tidak mau harus melakukan strategi penyelamatan bank, melalui skema *bailout* atau restrukturisasi utang, yang seluruhnya pasti akan memakai dana publik atau uang pajak rakyat.

Dengan kata lain, skema pembiayaan Kopdes MP melalui pinjaman dari Himbara berpotensi menjadi beban ganda bagi rakyat. Pertama, rakyat akan dirugikan akibat kegagalan pasar yang diciptakan oleh program Kopdes MP karena menyebabkan stagnasi dan bahkan kemunduran pembangunan desa. Kedua, rakyat akan menanggung kerugian karena pemerintah harus menggunakan dana APBN, yang berasal dari pajak rakyat, untuk melakukan strategi penyelamatan terhadap Bank Himbara.

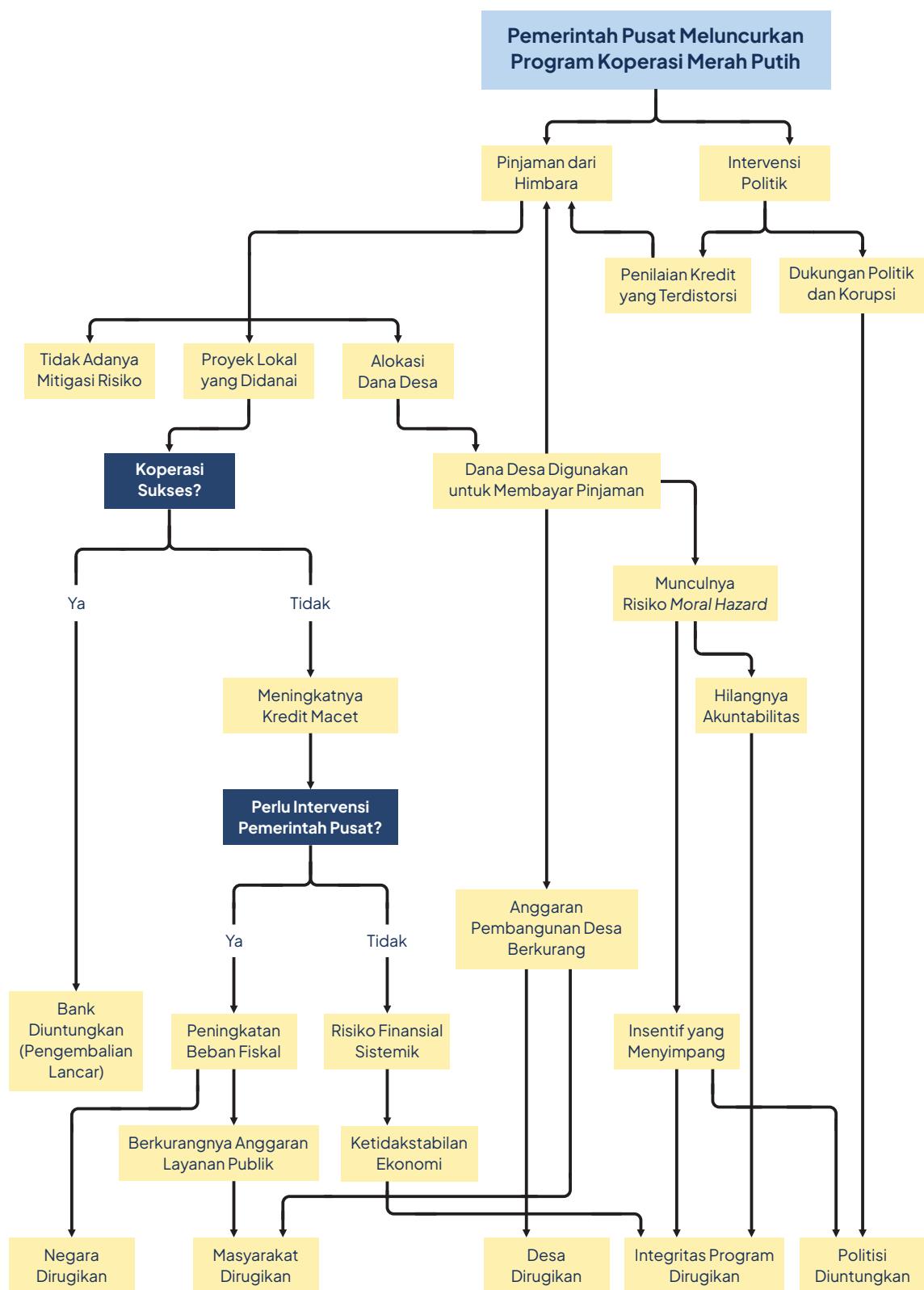
Gambar 7.
Pertumbuhan Penyaluran Kredit ke Koperasi (% YoY)



Sumber: CEIC, Bank Indonesia 2025 (diolah)

Gambar 8 menunjukkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) berisiko mendistorsi penilaian kredit perbankan. Meski diklaim pruden, pelaksanaannya tidak menjamin kepatuhan terhadap studi kelayakan karena minim perencanaan dan sarat intervensi politik. Hal ini meningkatkan potensi kegagalan pasar dan institusi, sehingga dana desa dialihkan untuk menutup kerugian koperasi alih-alih pembangunan produktif.

Gambar 8.
Skema Potensi Risiko Program Koperasi Desa Merah Putih



Sumber: Analisis Celios, 2025 (diolah)

Kreditur seperti Himbara pun terancam karena lonjakan kredit macet, yang akhirnya memicu intervensi fiskal melalui APBN. Ketergantungan ini membebani anggaran negara, mengurangi layanan publik, dan merugikan pemerintah desa serta masyarakat luas yang harus menanggung utang program yang tidak memberi manfaat nyata.

“

Saya tidak setuju karena estimasi biaya pendirian terlalu besar, dibandingkan dana desa ya jelas mana mungkin cukup. Kami juga bingung mencari model usahanya.

Perangkat Desa di Lampung

Sementara yang akan diuntungkan dari gagal atau berhasilnya program ini adalah politisi yang akan memanfaatkan Kopdes MP sebagai alat pencitraan untuk memperoleh dukungan elektoral, terlepas dari efektivitas implementasinya¹⁶. Politisi akan memperoleh dividen politik jangka pendek dengan membuat kampanye populis melalui jargon pembangunan desa, walaupun konsekuensinya ditanggung oleh masyarakat desa. Alhasil insentif yang seharusnya diterima oleh masyarakat desa justru menyimpang. Sehingga program Kopdes MP akan berakhir sama seperti program populis pada umumnya, dimana keberhasilan program hanya diukur dari distribusi dan penyerapan anggaran, bukan pada pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan.

¹⁶ Datta, A., et al. 2011. The Political Economy of Policy-Making in Indonesia: Opportunities for Improving the Demand for and Use of Knowledge. Overseas Development Institute. London. <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/politicaleconomy.pdf> (Diakses Pada 9 Mei 2025).

“

Pemerintah desa akan terbebani ketika harus menjelaskan kepada masyarakat, bagaimana program prioritas hasil musyawarah harus batal terlaksana karena anggarannya digeser ke Kopdes MP. Tampaknya Pusat memang suka mengadu masyarakat dengan pemerintahan yang paling bawah.

(Perangkat Desa di D.I. Yogyakarta)



KEBIJAKAN SENTRALISTIK: DANA DESA DIKUASAI TANPA PERSETUJUAN RAKYAT DESA

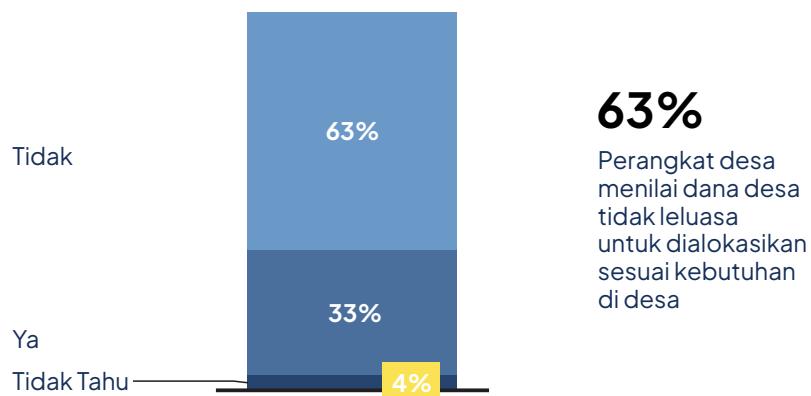
62 persen Perangkat Desa merasa bahwa mereka tidak mampu mengalokasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Pernyataan dari berbagai perangkat desa di Indonesia menunjukkan realitas pahit bahwa dana desa, yang semestinya menjadi instrumen kedaulatan dan pembangunan partisipatif, justru semakin dikendalikan secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Dana Desa menjadi instrumen pembiayaan yang menempatkan Pemerintah Pusat sangat dominan dalam memegang kendali pembangunan di desa. Selama ini desa terikat erat dengan pedoman penggunaan Dana Desa yang menentukan prioritas pembangunan, sasaran penerima program, dan besaran nominal anggaran secara ketat. Desa selalu dituntut untuk merealisasikan program titipan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai dari program ketahanan pangan, penanganan stunting, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai prioritas utama.

Gambar 9.

Keleluasaan penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa



Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, "Apakah selama ini Anda merasa memiliki keleluasaan yang cukup dalam menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa?. Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak Tahu".

Selama ini justru desa lebih banyak dituntut untuk memobilisasi sumber daya yang dimilikinya untuk menuntaskan pelaksanaan program prioritas pusat. Sekalipun proses perumusan program melalui musyawarah dan jaring aspirasi bertingkat dan menyiapkan waktu panjang, besaran alokasi sangat mudah diutak-atik oleh pusat dan berlaku seragam bagi seluruh desa. Bahkan, dalam rangka Koperasi Desa Merah Putih yang tidak banyak diprakarsai dalam aspirasi lokal dan belum masuk dalam anggaran sekalipun tetap akan berjalan tanpa interupsi yang berarti.

“

Pemerintah pusat terlalu mengatur penggunaan dana desa, tidak ada ruang leluasa pemerintah desa untuk menggunakan dana desa berdasarkan musyawarah masyarakat.

Perangkat Desa di Jawa Barat

Meski pemerintah terus menggaungkan retorika bahwa Program Kopdes MP ini bersifat partisipatif, pada praktiknya, musyawarah desa seringkali terlaksana bukan dalam fungsi rembug inisiatif program secara partisipatif, melainkan justru sibuk merinci tuntutan capaian program pusat. Pemerintah desa selalu berada pada posisi problematis. Desa sebagai representatif pemerintahan terbawah diharuskan tunduk pada pusat sekalipun berhadapan dengan protes masyarakat yang merasa dirugikan atas program tersebut.

Desain Koperasi Desa yang dibangun atas kepentingan pemerintah pusat sangat terasa dengan penyeragaman unit usaha, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang sangat birokratis, dan minimnya rasa kepemilikan oleh masyarakat desa. Keraguan publik atas program ini belakangan menguat seiring pengalaman mangkraknya program pusat yang tidak sejalan dengan potensi dan minat di daerah.

“

Apabila memaksa menggunakan dana desa, nantinya bukan hanya mengurangi anggaran infrastruktur, tetapi juga anggaran pemberdayaan dan operasional lembaga akan kegerus. Ujungnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa akan turun drastis.

Perangkat Desa di D.I. Yogyakarta

Konsekuensi dari program Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya akan menggeser alokasi anggaran pembangunan jalanan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur lainnya yang selalu menjadi tuntutan reguler daerah. Kondisi ini bisa memperdalam ketimpangan infrastruktur dan rendahnya kualitas hidup masyarakat di desa. Akses distribusi dan transportasi yang tak berkembang mengakibatkan ekonomi desa lesu dan potensi desa tak tumbuh optimal sebagai pendapatan asli. Masyarakat desa harus membayar lebih untuk menjual komoditas hasil pertanian ke kota hingga menempuh perjalanan lebih lama karena buruknya akses jalanan penghubung.

“

Kami di desa tidak bisa ngomong banyak, kami di desa hanya bisa ikut pemerintah.

Perangkat Desa di Nusa Tenggara Timur

Tidak hanya itu, realokasi anggaran dilakukan masif dengan kontribusi anggaran publik di berbagai tingkatan. Pemerintah Daerah juga diminta berkontribusi dalam menalangi biaya akte notaris dan pra pendirian melalui Bantuan Tidak Terduga (BTT).¹⁷ Padahal bantuan tersebut umumnya ditujukan untuk memitigasi kondisi dan keperluan darurat apabila terjadi bencana, konflik, dan perubahan drastis yang tak terprediksi. Hal ini justru akan menambah kerentanannya daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana dan risiko sosial lainnya.

¹⁷ Tempo. 2025. Pos Belanja Tak Terduga di APBD bakal Bisa untuk Membaiayai Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta. <https://www.tempo.co/ekonomi/pos-belanja-tak-terduga-di-apbd-bakal-bisa-untuk-membaiayai-koperasi-desa-merah-putih-1233287> (Diakses pada 24 Mei 2025).



Simulasi Dampak Kopdes MP terhadap Dana Desa

Studi ini mencoba mengestimasi beban fiskal Kopdes MP terhadap Dana Desa dengan tiga skema, yaitu skema A, B, dan C. Kalkulasi ini mengasumsikan pendirian koperasi sebanyak 80.000 unit dengan skema kredit selama 10 tahun dan bunga 3% per tahun, beserta biaya lain lain seperti biaya asuransi kredit 0,5% dan biaya administrasi 0,5%. Skenario berdasarkan nilai pinjaman per koperasi meliputi skenario A, B, dan C dengan besaran masing-masing Rp3 miliar, Rp4 miliar, dan Rp5 miliar.

Berdasarkan skema tersebut, risiko akan sangat besar membebani Dana Desa terutama pada skenario B dan C yang menghabiskan lebih dari separuh Dana Desa hanya untuk pembayaran cicilan koperasi. Dengan demikian, penambahan alokasi APBN akan semakin diperlukan untuk menutup kekurangan sektor lain yang terpangkas.

Dalam skema B dan C, alokasi cicilan tahunan mencapai masing-masing Rp44,8 triliun (63%) dan Rp56 triliun (78,8%) dari total Dana Desa nasional yang hanya Rp71 triliun per tahun. Artinya, dalam skema yang dianggap "sedang", persentase Dana Desa terhisap ke pembayaran kewajiban koperasi berpengaruh signifikan.

Klaim bahwa skema koperasi desa aman karena cicilannya dijamin melalui Dana Desa sesungguhnya menutup-nutupi risiko struktural yang justru semakin membebani keuangan publik. Pertama, terdapat risiko fiskal terselubung (*quasi-fiscal risk*) yang muncul akibat penggunaan Dana Desa secara massif untuk pembayaran cicilan.

Tabel 2.
Risiko Fiskal dan Perbankan

Skema	Pinjaman Pokok	Biaya Pinjaman Per Tahun	Total Cicilan dan Bunga per Tahun (Tenor 10 Tahun)	Total Cicilan dan Bunga Ditanggung Seluruh Kopdes MP per Tahun	Porsi Terhadap Dana Desa
A	3 Milyar	120 Juta	420 Juta	33,6 Triliun	47,3%
B	4 Milyar	160 Juta	560 Juta	44,8 Triliun	63%
C	5 Milyar	200 Juta	700 Juta	56 Triliun	78,8%

Keterangan: Asumsi bunga pinjaman 3% per tahun dari Bank BUMN.
Biaya pinjaman termasuk biaya asuransi kredit 0,5% dari pokok pinjaman dan biaya administrasi 0,5%.

Terdapat risiko residual terhadap Bank Himbara akibat penyaluran pinjaman Kopdes MP sehingga memicu terjadinya krisis keuangan sistemik. Jika transfer Dana Desa mengalami keterlambatan satu bulan, Bank Himbara terpapar risiko likuiditas antara Rp2,8 - 4,6 triliun per bulan. Risiko lain, apabila BPK menemukan terjadinya penyimpangan massal, tekanan publik dan politik untuk menghentikan program, maka risiko meningkat signifikan. Hal ini bukan hanya berdampak pada reputasi perbankan BUMN tetapi juga reputasi Danantara.

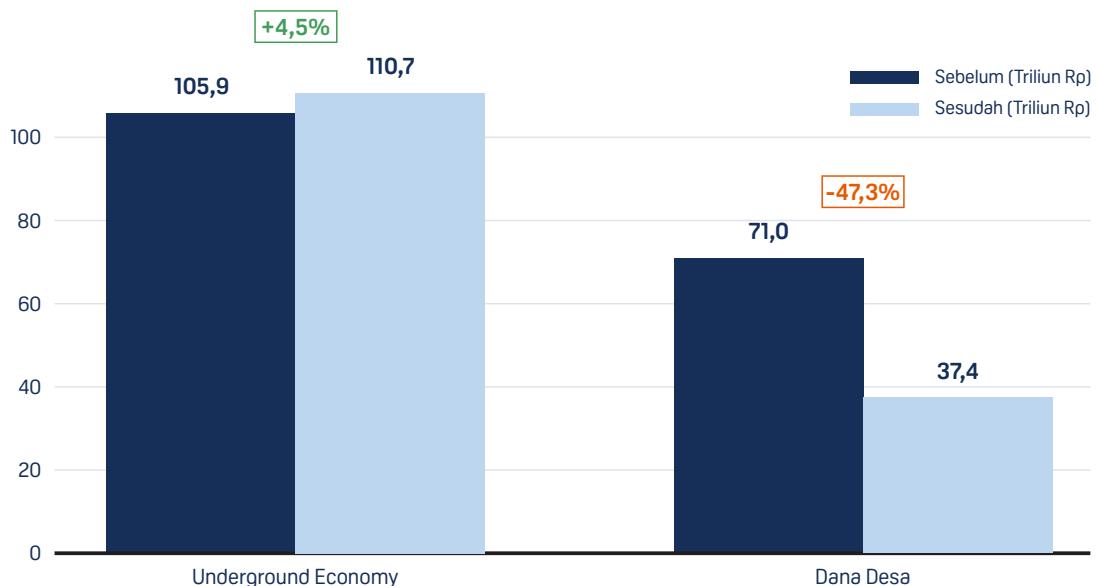
Skenario Risiko Bank (Residual)

 Risiko	 Estimasi Dampak Potensial
Pembayaran Dana Desa terlambat (1 bulan rata-rata)	Gangguan cashflow Rp2,8-4,6 triliun/bulan
Risiko reputasi bank karena kredit gagal fungsi	Tidak terukur langsung, tapi berdampak politis
Tekanan regulasi jika audit BPK mengindikasikan penyimpangan massal	Risiko penghentian kredit, <i>rollback</i> program

Dengan demikian, pembayaran yang dijamin melalui Dana Desa tidak menjawab permasalahan. Konsekuensinya justru menggeser risiko keuangan dari bank ke pemerintah dan tetap berisiko tinggi secara fiskal dan tata kelola. Selain itu, Dana Desa akan mengalami distorsi manfaat yang sangat besar antara Rp33,6–56 triliun per tahun akibat digunakan untuk pembayaran cicilan ke perbankan. Pada akhirnya, program ini berpotensi menimbulkan lubang fiskal jangka panjang akibat tingginya risiko *governance*, kegagalan proyek, dan koperasi yang tidak berjalan efektif.

Gambar 10.

Perbandingan nilai dana desa dan *underground economy* pada periode sebelum dan sesudah Kopdes MP



Sumber: Analisis CELIOS, 2025.

Catatan: Metode estimasi dijelaskan lebih lanjut pada tabel simulasi 3 dan 4.¹⁸¹⁹

Terdapat risiko tata kelola (*governance risk*), karena jaminan pembayaran menciptakan insentif buruk (*moral hazard*). Dalam konteks ini, koperasi tidak memiliki insentif untuk menjalankan bisnis secara prudent karena merasa “diselamatkan” oleh jaminan negara. Hal ini membuka peluang masif untuk korupsi dan manipulasi, termasuk pembentukan koperasi fiktif, penyalahgunaan dana untuk kepentingan elite lokal, serta alokasi proyek-proyek fiktif atau berbau kampanye politik.

Simulasi kuantitatif terhadap skema pembiayaan koperasi desa secara terang menunjukkan bahwa program ini bukan hanya rawan gagal secara fiskal, tetapi juga berpotensi menjadi kanal besar ekspansi kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*)²⁰²¹. Dengan asumsi 80.000 koperasi desa masing-masing mendapat pinjaman Rp 3 miliar dari bank Himbara, total pembiayaan yang ditanggung desa mencapai Rp240 triliun dalam 10 tahun, dengan cicilan tahunan Rp33,6 triliun. Jika dibayarkan melalui Dana Desa, maka lebih dari 47,3% anggaran desa akan terpakai hanya untuk cicilan utang, menyisakan hanya sekitar 52,7% atau Rp467 juta per desa per tahun, angka yang sangat tidak memadai untuk pembiayaan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi desa.

Dalam konteks ini, Dana Desa tidak lagi menjadi alat pembangunan, tetapi berubah menjadi “saluran utang” sistemik. Lebih mengkhawatirkan lagi, dengan asumsi konservatif kebocoran 20%, mengacu pada studi World Bank tentang pengadaan di tingkat desa, setidaknya Rp48 triliun selama 10 tahun (atau Rp4,8 triliun per tahun) akan hilang ke sektor informal, rente, dan kegiatan ekonomi ilegal²². Dana ini bocor melalui praktik markup proyek koperasi, pembentukan koperasi fiktif, pembelian barang dari luar desa, hingga konsinyasi ke elite lokal yang tidak menciptakan nilai tambah produktif.

18 Kompas. 2024. Apa itu “Shadow Economy” dan Bagaimana Potensinya. <https://www.kompas.id/artikel/apa-itu-shadow-economy-dan-bagaimana-potensinya> (Diakses 20 Mei 2025)

19 Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 2025. Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes MP. <https://kecpulautigabarat.natunakab.go.id/KopDesmerahputih/Dana%20Desa%20dan%20Koperasi%20Desa%20Merah%20Putih.pdf> (Diakses Pada 8 Mei 2025).

20 Secara keseluruhan kegiatan ekonomi ini bersifat legal maupun ilegal, namun tidak tercatat secara statistik dengan maksud untuk menghindari pajak.

21 The Fraser Institute. 1997. The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact. Vancouver, British Columbia, Canada. <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/UndergroundEconomy.pdf> (Diakses Pada 15 Mei 2025)

22 Schneider et al. 2010. Shadow Economies All over the World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. <https://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf>

“

Katanya otonomi tapi kami hanya menjalankan program prioritas pemerintah pusat hingga tidak bisa memenuhi kepentingan masyarakat desa.

Perangkat Desa di Jawa Barat

Uang publik yang semestinya memperkuat ekonomi lokal justru mengalir ke kontraktor luar desa dan elite rente, memperparah ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Parahnya lagi, dari total Rp374 triliun Dana Desa yang efektif tersisa untuk pembangunan selama satu dekade, sebesar 12,8% justru hilang.

Artinya, setiap satu rupiah yang benar-benar digunakan untuk pembangunan, hampir lima puluh sen menguap ke ekonomi ilegal atau tak tercatat. Ini bukan hanya kegagalan desain kebijakan, tapi bentuk pemiskinan terstruktur melalui program yang dibungkus jargon pemberdayaan. Di balik retorika koperasi desa, tersembunyi skema rente raksasa yang melemahkan fiskal negara, memperluas *underground economy*, dan memperdalam ketimpangan struktural antarwilayah.

■ Simulasi Kebocoran Dana Desa ke *Underground Economy*

Tabel 3.
Asumsi Kebocoran Dana Desa



*Berdasarkan studi empiris lainnya, kebocoran pengadaan bisa mencapai 20-30%. Dalam hal ini tim penulis menggunakan 20%²³.

■ Dampak Terhadap Pembangunan Desa

Tabel 4.
Estimasi kebocoran dana publik yang mengalir ke *underground economy* Selama 10 tahun



■ Ke Mana Lari Dana yang Bocor

Sumber kebocoran dana publik yang mengalir ke *underground economy*, meliputi:

Sumber kebocoran	Mekanisme	Dampak
Markup pengadaan koperasi	Proyek pengadaan alat, bangunan koperasi, dll dimarkup	Dana mengalir ke kontraktor luar desa
Koperasi fiktif atau inaktif	Didirikan hanya untuk pinjam, lalu tidak aktif	Dana tidak berputar, tapi tetap harus dibayar
Konsinyasi/ pembelian ke kota	Barang/jasa dibeli dari kota, bukan dari desa	Uang mengalir ke kota, bukan lokal
Rent-seeking elite lokal/daerah	Dana digunakan untuk bayar fee informal	Masuk kantong elite, tidak produktif

23 Dahan. 2020. Shadow Economy, AEOI, dan Kepatuhan Pajak. Jakarta. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/51/23>



Ringkasan Risiko dalam Angka

Kategori

Beban cicilan terhadap Dana Desa (per tahun)

Estimasi Nilai Risiko per Tahun (Skenario A - Rp3 M)

Rp33,6 triliun

Kategori

Dana hilang karena penyimpangan (per tahun)

Estimasi Nilai Risiko per Tahun (Skenario A - Rp3 M)

Rp 4,8 triliun

Kategori

Risiko fiskal tambahan (pembengkakan APBN per tahun)²⁴

→ Rp38,4 triliun

²⁴ Total risiko fiskal dari beban cicilan dan underground economy

Dana Posyandu berkurang dimakan Kopdes MP

Dana desa selama ini menghidupi jalannya fungsi pemerintahan dan layanan publik sebagai sumber pendanaan utama dalam memenuhi honorarium aparatur, perangkat operasional, guru, dan kader di lingkungan desa. Salah satu amanat pokok Dana Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar adalah layanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu, Polindes, dan kegiatan pencukupan gizi anak dan ibu hamil.

Keseluruhan pengambilan keputusan pos anggaran disepakati dalam Musyawarah Desa yang afirmatif dan partisipatif. Namun, belakangan program prioritas pusat semakin terbiasa melakukan realokasi anggaran secara masif di tengah jalan.

Letak masalah krusial dalam program Kopdes MP disebabkan anggarannya belum tersedia sedari awal. Konsekuensinya ditanggung oleh pemerintah desa yang dipaksa oleh tuntutan pusat untuk memangkas Dana Desa sekalipun sudah ditentukan peruntukannya. Hal ini menjadi praktik yang banyak ditemukan, sebagaimana terjadi instruksi pemotongan anggaran terhadap Program Makanan Tambahan (PMT). Padahal program PMT ditujukan kepada mereka yang paling rentan mengalami stunting. Gara-gara skema pembiayaan Kopdes MP yang amburadul, anggaran untuk program yang sudah betul-betul berdampak bagi masyarakat justru dikorbankan.

“Sekarang di desa sedang bingung karena anggaran PMT kemungkinan kepotong karena program Kopdes MP, karena anggarannya bisa sampai Rp500 juta dan itu diwajibkan”. (Perangkat Desa di Sulawesi Tenggara).



© Antara Foto



KOPDES MP BERPOTENSI MENGHAMBAT PROGRESS PENGEMBANGAN BUMDES

Penyuntikan dana Bank Himbara ke dalam koperasi desa akan membuat BUMDes sulit untuk bersaing dengan Koperasi Merah Putih.²⁵ Dana raksasa dari luar desa dapat melemahkan insentif untuk membangun kemandirian ekonomi lokal, termasuk mengembangkan BUMDes.²⁶ Menggabungkan BUMDes dan Koperasi Merah Putih justru berisiko melemahkan keduanya karena logika pengelolaan dan sumber pendanaannya berbeda.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Koperasi Desa Merah Putih besutan Prabowo tidak bisa disatukan begitu saja karena keduanya memiliki **dasar hukum, tujuan kelembagaan, serta struktur organisasi yang berbeda**, yang berpotensi menimbulkan konflik peran, tumpang tindih fungsi, dan bahkan pemberosan sumber daya.

Jika BUMDes dan Kopdes MP menjalankan fungsi yang tumpang tindih, seperti distribusi pupuk, pemasaran hasil pertanian, atau penyaluran kredit mikro, maka desa justru berpotensi menjadi arena konflik kelembagaan dan pemberosan fiskal. Alih-alih memperkuat ekonomi lokal, kondisi ini dapat memicu persaingan tidak sehat antar-lembaga yang sama-sama merasa berwenang dan "mewakili" kepentingan masyarakat.

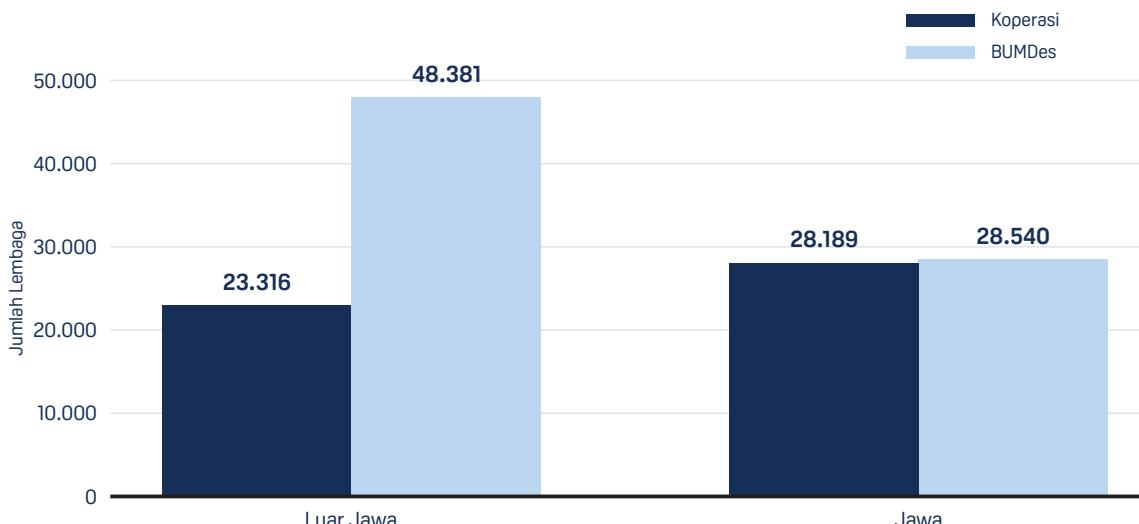
Persaingan ini bukan hanya melemahkan efektivitas pelayanan, tetapi juga menimbulkan fragmentasi sosial, apalagi jika masing-masing lembaga terafiliasi dengan faksi politik lokal yang berbeda.

Pada akhirnya dengan mendanai Koperasi Merah Putih secara serampangan, investasi sosial dan modal yang sudah dikembangkan BUMDes selama bertahun-tahun terancam sia-sia. Ketika negara tiba-tiba mengalihkan fokus dan alokasi anggaran ke lembaga baru seperti Kopdes MP, tanpa terlebih dahulu mengevaluasi dan memperkuat ekosistem BUMDes yang ada, maka energi sosial yang selama ini dikembangkan berisiko sia-sia.

25 CNN Indonesia. 2025. Koperasi Desa Merah Putih Butuh Rp5 M per Desa. Jakarta. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250307122127-78-1206152/koperasi-desa-merah-putih-butuh-rp5-m-per-desa> (Diakses pada 20 Mei 2025).

26 Sebagai perbandingan, dana desa tidak sampai 1 miliar Rupiah per desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2025. Rincian Dana Desa per Tahun Anggaran 2025. Jakarta. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>

Gambar 11.
Perbandingan Jumlah Koperasi dan BUMDes di Jawa dan Luar Jawa



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Data menunjukkan bahwa di luar Pulau Jawa terdapat 48.381 BUMDes, hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah koperasi yang hanya mencapai 23.316. Sebaliknya, di wilayah Jawa, jumlah koperasi mencapai 28.189, lebih banyak dibandingkan jumlah BUMDes yang berjumlah 28.540. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan orientasi kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang sangat signifikan. Di luar Jawa, BUMDes telah menjadi aktor dominan dalam ekonomi desa, karena keberadaannya memang difasilitasi oleh intervensi negara melalui UU Desa dan berbagai program afirmatif pembangunan desa pasca reformasi.

“

Kasus korupsi dana BUMDes sudah banyak, anggaran pendirian Kopdes MP yang besar justru akan menciptakan korupsi yang semakin besar.

Perangkat Desa di Sulawesi Utara

Studi ini menunjukkan bahwa 3 dari 10 orang secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dapat berdampak negatif terhadap eksistensi dan kelangsungan BUMDes. Mereka melihat bahwa jika Kopdes MP mengambil alih peran yang selama ini setidaknya secara formal diemban oleh BUMDes, maka akan terjadi tumpang tindih fungsi, pembelahan peran ekonomi desa, dan bahkan risiko pengabaian terhadap investasi sosial dan keuangan yang selama ini telah ditanamkan di BUMDes.

“

Koperasi Desa Merah Putih akan berakhir sama dengan KUD dan BUMDes yang akan mati.

Perangkat Desa di Nusa Tenggara Timur

Namun, cukup banyak yang menyatakan bahwa kehadiran Kopdes MP tidak akan terlalu berpengaruh terhadap BUMDes. Tapi jawaban ini bukan mencerminkan sikap optimis, melainkan lebih sebagai bentuk apatisme, karena BUMDes di desa mereka sendiri memang tidak berjalan secara signifikan bahkan sebagian nyaris tidak aktif.

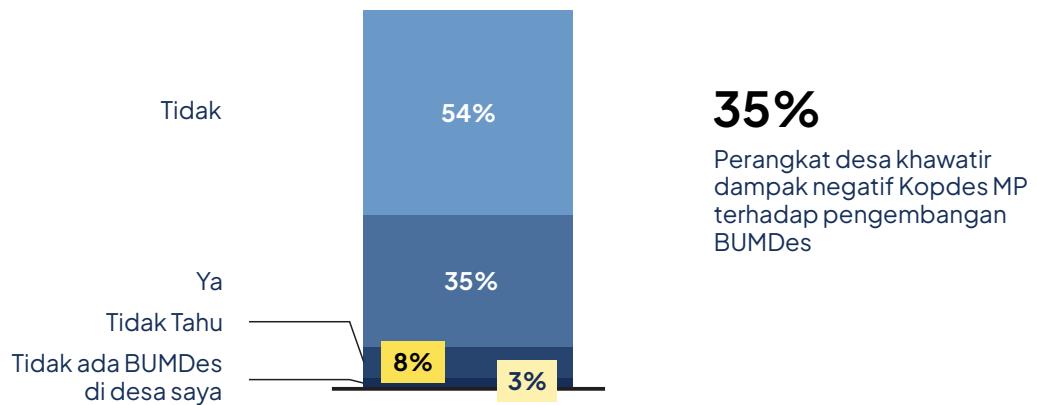
“

Kondisi akhirnya adalah tunggakan pinjaman. Simpannya tidak jalan, Pinjamnya yang malah lancar.

Perangkat Desa di Bandung, Jawa Barat

Gambar 12.

Pengaruh Kopdes MP terhadap Gangguan Pengembangan BUMDes



Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, “Apakah menurut Anda Program Kopdes MP ini dapat mengganggu perkembangan BUMDes yang sudah ada?”. Opsi jawaban meliputi “Ya”, “Tidak”, “Tidak Tahu”, dan “Tidak ada BUMDes di desa saya”.

Bukannya BUMDes juga banyak yang kacau dan gagal?

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia menunjukkan keberhasilan signifikan²⁷. Banyak yang mampu menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan asli desa, hingga menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Namun, juga banyak BUMDes yang kini berada dalam kondisi "hidup segan, mati tak mau"²⁸. Mereka eksis secara legal, tetapi secara operasional nyaris tidak berjalan. Beberapa bahkan sekadar menjadi papan nama tanpa aktivitas yang nyata.

Salah satu penyebabnya adalah karena tidak sedikit pengurus BUMDes yang dipilih bukan karena kapasitas atau kompetensinya, melainkan karena kedekatan personal dengan kepala desa, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja dan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, dana penyertaan modal dari APBDes kepada BUMDes juga tidak selalu optimal, baik dari segi besaran maupun keberlanjutannya. Dalam banyak kasus, dana tersebut dicairkan tanpa rencana bisnis yang matang atau kajian kelayakan usaha, sehingga mudah hilang tanpa hasil yang jelas. Akuntabilitas penggunaan dana pun kerap tidak transparan.

Lebih parah lagi, keberlangsungan BUMDes kerap terancam oleh dinamika politik lokal. Ketika terjadi pergantian kepala desa, BUMDes yang sebelumnya berjalan baik pun bisa terhenti atau bahkan 'dihancurkan' karena dianggap sebagai peninggalan rezim sebelumnya.

Penguatan regulasi, profesionalisasi manajemen BUMDes, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat desa menjadi langkah penting. Selain itu, penting pula memastikan bahwa keberadaan BUMDes tidak ditentukan oleh dinamika politik sesaat, melainkan dijamin oleh sistem yang menjunjung keberlanjutan dan transparansi.

Dalam konteks ini, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) sebagai alternatif atau pelengkap BUMDes belum tentu menjadi solusi mujarab. Sebab, karakter kelembagaan Kopdes MP juga tidak jauh berbeda dengan BUMDes, terutama jika tetap dikendalikan oleh elite lokal yang sama dan tanpa perbaikan sistem tata kelola yang mendasar. Jika akar permasalahan seperti patronase politik, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya kapasitas tidak ditangani, maka Kopdes MP berisiko menjadi sekadar replikasi dari kegagalan BUMDes, dengan baju baru, tetapi masalah lama.

27 Kompasiana. 2025. Belajar dari 18 BUMDes Sukses Mensejahterakan Desa. https://www.kompasiana.com/suryokocosuryoputro1324/67b9e692ed64155ae1503b32/belajar-dari-18-bumdes-sukses-mensejahterakan-desa-atkompasianadesa?page=1&page_images=1 (Diakses pada 22 Mei 2025).

28 Immaculata, Maria. 2025. BUMDes Antara Hidup dan Mati, Masyarakat Minta Evaluasi. <https://rri.co.id/daerah/1499281/bumdes-antara-hidup-dan-mati-masyarakat-minta-evaluasi> (Diakses pada 22 Mei 2025).

“

Pemerintah desa semakin terbebani dengan adanya Kopdes MP di tengah KUD dan BUMDes yang sudah ada. Saya khawatir, Ngeri-ngeri sedap dengan jumlah uang yang besar karena kami belum siap untuk mengelolanya.

(Perangkat Desa di Bangka Belitung)



KOPDES MP MERUSAK EKOSISTEM USAHA DESA

Penyuntikan dana besar ke dalam Koperasi Desa Merah Putih juga mengancam kelangsungan usaha mikro yang tumbuh organik di desa, seperti toko kelontong, pedagang sembako, pengepul hasil tani, dan unit usaha pertanian lokal.

Dengan keistimewaan akses terhadap modal jumbo dan jaringan distribusi nasional, Kopdes MP menciptakan market distortion yang tidak sehat, menginvasi ekosistem ekonomi desa yang telah terbentuk berdasarkan relasi sosial, kepercayaan, dan kebutuhan riil komunitas.

Berbagai unit usaha yang ditawarkan Kopdes MP seperti gerai sembako, unit simpan pinjam, hingga gerai *cold storage* bukanlah inovasi, melainkan duplikasi dari usaha yang sudah ada. Ketika usaha-usaha tersebut disuntik dana besar oleh negara, pelaku lokal yang tidak memiliki perlindungan atau daya saing setara akan tergeser dari pasar. Bukan tidak mungkin, dalam waktu singkat, struktur ekonomi desa berubah menjadi oligopolistik, di mana Kopdes MP menjadi satu-satunya aktor dominan, membunuh keragaman usaha lokal dan menghancurkan ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang selama ini menopang ketahanan sosial dan ekonomi desa. Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya mengancam keberlangsungan usaha lokal, tetapi juga melemahkan kemandirian ekonomi desa dan memperdalam ketimpangan struktural antara pusat dan daerah.

Hasil survei menunjukkan bahwa 23% responden menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) secara langsung mengganggu pendapatan usaha masyarakat yang telah ada, seperti apotek lokal atau toko gabah, menandakan munculnya kekhawatiran nyata terhadap potensi persaingan usaha yang tidak setara atau bahkan dominasi pasar oleh Kopdes MP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, muncul kekhawatiran dalam skema usaha simpan pinjam karena tingginya tingkat tunggakan kredit pinjaman oleh masyarakat. Masyarakat hanya menganggap ringan konsekuensi dari ketidakpatuhan pengembalian pinjaman. Bahkan, pinjaman yang bersumber dari uang publik dilihat masyarakat sebagai bentuk fasilitas bantuan negara yang tak wajib dikembalikan. Sebagian aparatur desa yang sudah memiliki pengalaman mengelola BUMDes dalam usaha simpan pinjam cenderung skeptis. Kopdes MP dirasa akan berakhir persis dengan kabangkrutan BUMDes yang aliran keuangannya tak stabil akibat pengembalian utang masyarakat tak berjalan lancar.

Selain itu, Kopdes MP belum memenuhi ekspektasi pemberdayaan inklusif yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan di desa. Kopdes MP belum melihat potensi kemunculan berbagai usaha mandiri yang digerakkan oleh perempuan sebagai sasaran program progresif sebagai kebaruan Kopdes MP dari lembaga sejenis lainnya. Justru, mengingat ketidaksiapan SDM di desa yang masih minim informasi terkait Kopdes MP akan membuat partisipasi masyarakat didalamnya mengalami penurunan.

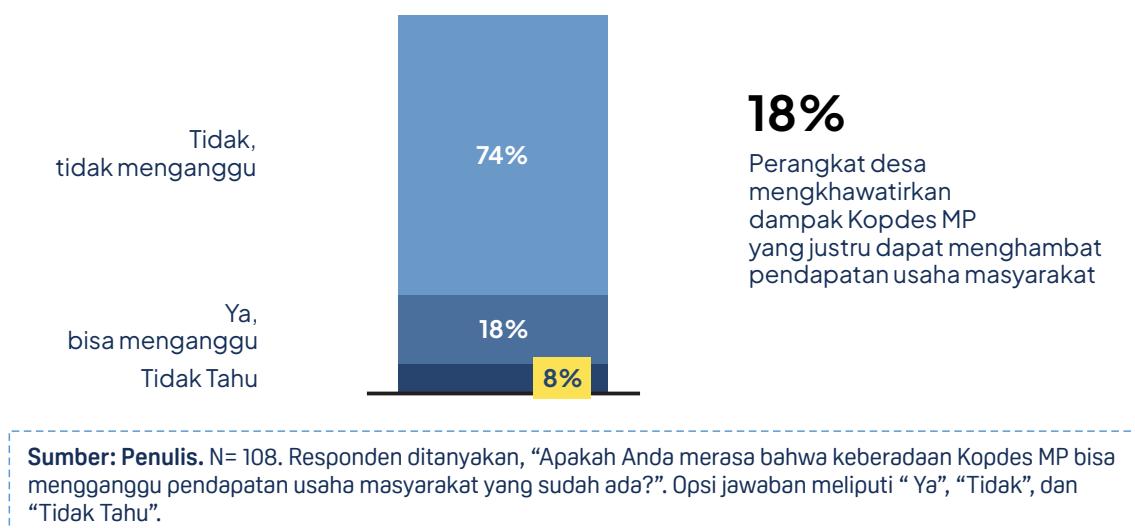
“

Saya yakin sekali, dari pengalaman kami itu koperasi simpan pinjam dari pemerintah tidak akan pernah kembali utuh karena bagi masyarakat pinjaman itu fasilitas negara.

Perangkat Desa di Sulawesi Barat

Gambar 13.

Pengaruh Kopdes MP terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat



Jika kebijakan monopoli distribusi obat di seluruh klinik dan apotek desa oleh Lab TNI benar-benar diterapkan, maka konsekuensinya sangat luas dan merugikan. Dengan harga obat dari Lab TNI yang 10% lebih mahal dibanding distributor swasta, serta elastisitas permintaan sektor kesehatan sebesar -1,5, maka terjadi penurunan konsumsi obat hingga 15%. Artinya, masyarakat desa yang secara struktural lebih rentan justru akan mengurangi konsumsi obat, vitamin, dan suplemen ketika sakit bukan karena sembuh, tetapi karena daya beli menurun.

Kondisi ini bertentangan langsung dengan tujuan kesehatan publik. Ditambah lagi, lebih dari 81 juta orang di desa membeli obat tanpa resep, yang cenderung tidak disubsidi dan sangat sensitif terhadap harga. Dengan kata lain, kebijakan ini memperbesar ketimpangan akses kesehatan antara kota dan desa, memaksa kelompok berpendapatan rendah untuk menanggung beban biaya lebih tinggi, bahkan dalam kondisi sakit. Di balik argumen “ketahanan obat nasional” melalui TNI, tersembunyi risiko eksklusi jutaan pasien dari akses pengobatan dasar.



Masalahnya bukan setuju atau tidak, tapi masalahnya itu ada di regulasi pemerintah yang berganti-ganti.

Perangkat Desa di Sulawesi Tengah

Selain dampak konsumsi, konsekuensi ekonomi kebijakan ini juga tidak bisa diremehkan. Sentralisasi distribusi obat ke tangan militer tidak hanya mematikan ekosistem swasta yang telah terbentuk bertahun-tahun, tetapi juga menciptakan inefisiensi logistik karena Lab TNI tidak memiliki jaringan apoteker lokal dan minim pemahaman atas kebutuhan obat di tiap desa. Setidaknya Rp4 triliun potensi kerugian dialami fasilitas kesehatan desa per tahun, ditambah ancaman PHK massal terhadap 175 ribu pekerja farmasi swasta yang kehilangan pasar.

Simulasi distribusi obat di desa, dilakukan oleh TNI

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memproduksi obat-obatan melalui laboratorium farmasi militer yang telah ada. Obat-obatan ini akan didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih²⁹.

Rencana Kementerian Pertahanan mendistribusikan obat ke seluruh apotek dan klinik desa³⁰, yang sebelumnya bebas memilih dari distributor swasta, koperasi, atau BUMN. Dengan asumsi jumlah produksi obat tetap konstan dan harga obat dari TNI 10% lebih mahal dibanding distributor swasta, serta elastisitas permintaan sektor kesehatan sebesar 1,5, kebijakan ini berpotensi menimbulkan perubahan signifikan dalam pola distribusi dan harga di tingkat desa, memengaruhi efisiensi pasar serta aksesibilitas obat bagi masyarakat.

Asumsi Dasar Kebijakan

- 1 58.176 apotek dan klinik desa hanya menerima distribusi obat dari TNI.
- 2 Sebelumnya, mereka bebas memilih distributor (swasta, koperasi, BUMN).
- 3 Elastisitas untuk sektor kesehatan sebesar 1,5.
- 4 Jumlah produksi obat tetap konstan
- 5 Harga obat dari TNI hanya 10% lebih mahal dari distributor swasta.

²⁹ CNN Indonesia. 2025. Menhan Sebut TNI Bakal Produksi Obat, Disuplai ke Kopdes MP. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250430202048-20-1224478/menhan-sebut-tni-bakal-produksi-obat-disuplai-ke-KopDes-merah-putih> (Diakses pada 20 Mei 2025)

³⁰ Kementerian Pertahanan RI. 2025. Rapat Rencana Pendidistribusian Obat Obatan Produksi Lafi TNI Dukung Gerai Apotek Di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Jakarta. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2025/05/16/rapat-rencana-pendidistribusian-obat-obatan-produksi-lafi-tri-dukung-gerai-apotek-di-koperasi-desa-merah-putih-kdmp.html> (Diakses pada 21 Mei 2025).

Dampak Terhadap Konsumsi Obat

$$e = \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

Menggunakan penelitian sebelumnya³¹ elastisitas pendapatan sebesar 1,5 dan harga obat diasumsikan naik 10% karena ineffisiensi. Maka dapat dihitung:

$$1,5 = -\frac{\Delta Q}{10\%} \quad -15\% = \Delta Q$$

Alhasil, jumlah obat, vitamin, suplemen yang diminta akan turun sebesar 15% dengan peningkatan harga sebesar 10%. Hal ini belum tentu setara dengan kondisi kesehatan masyarakat yang membaik, justru masyarakat akan cenderung untuk tidak mengkonsumsi obat saat sakit.

Tabel 5.
Perbandingan Konsumsi Obat Antara Desa dan Kota

	Obat Dibeli dengan Resep		Obat Dibeli tanpa Resep	
	Pembeli Subsidi	Pembeli Non-Subsidi	Pembeli Subsidi	Pembeli Non-Subsidi
Kota	6.378.696	19.281.594	12.078.670	113.859.093
Desa	2.539.236	14.517.947	5.658.742	81.695.215
Total	8.917.932	33.799.540	17.737.412	195.554.308

Sumber: BPS, diolah oleh Celios (2025)

Desa cenderung lebih bergantung pada pembelian tanpa resep. Naiknya harga dapat memperlebar ketimpangan akses obat antara kota dan desa. Setidaknya 33,8 juta orang harus membeli obat resep dan 195,5 juta orang harus membeli obat tanpa resep dengan harga yang lebih tinggi, sebagian mereka yang tinggal di desa.

Tabel 6.
Dampak Finansial terhadap Fasilitas Kesehatan Desa sebelum dan sesudah adanya laboratorium TNI (dalam Rp)

	Sebelum adanya lab TNI		Sesudah adanya lab TNI	
	Pembeli Subsidi	Pembeli Non-Subsidi	Pembeli Subsidi	Pembeli Non-Subsidi
Kota	6.974.666.812.043	15.165.674.486.695	7.672.133.493.247	12.890.823.313.691
Desa	2.436.828.275.573	22.402.285.882.381	2.680.511.103.130	19.041.943.000.024
Total	9.411.495.087.616	37.567.960.369.076	10.352.644.596.378	31.932.766.313.715
Perubahan				-4.694.044.546.600

Sumber: BPS, diolah oleh Celios (2025)

Dampak nasional: Hilangnya sekitar Rp4,7 triliun dalam industri farmasi setiap tahun di Indonesia.

31 Robinson L, et al. 2019. Valuing mortality risk reductions in global benefit-cost analysis. [https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/71252D2A48B3F2402DF209550C1945FA/S219458881800026Xa.pdf](https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/71252D2A48B3F2402DF209550C1945FA/S219458881800026Xa.pdf/div-class-title-valuing-mortality-risk-reductions-in-global-benefit-cost-analysis-div.pdf) (Diakses pada 17 Mei 2025)

Dampak terhadap Ekosistem Farmasi



Rangkuman Dampak Negatif

Aspek Kerugian Industri Farmasi	Estimasi Dampak Negatif Rp4,7 triliun/tahun
Aspek Pasien terdampak	Estimasi Dampak Negatif Setidaknya 195,5 juta orang
Aspek PHK sektor farmasi swasta	Estimasi Dampak Negatif 174.528 pekerja



Koperasi Medis Terbesar di Dunia “Unimed Brazil” dalam Upaya Demokratisasi Pelayanan Kesehatan dan Gerakan Sipil Menolak Komersialisasi Medis³²

Pada tahun 1967, di Santos, Brasil, sekelompok dokter yang dipimpin Dr. Luiz Camargo Barbosa menolak tunduk pada komersialisasi layanan kesehatan yang menjadikan pasien sebagai konsumen dan dokter sebagai buruh perusahaan asuransi. Mereka merespons dengan mendirikan Unimed (*União dos Médicos*) — koperasi medis pertama di Brasil.

Unimed lahir dari prinsip bahwa layanan kesehatan adalah hak sosial, bukan komoditas. Modelnya menempatkan dokter sebagai pemilik dan pengelola, dengan struktur demokratis dan sistem remunerasi yang adil. Setiap anggota memiliki suara setara dan otonomi profesional dijaga, menjadikan solidaritas mengantikan transaksi dalam relasi pasien-dokter.

Dalam waktu lima dekade, Unimed berkembang menjadi jaringan koperasi medis terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 340 koperasi lokal, 117.000 dokter anggota, dan melayani lebih dari 20 juta pasien di 84% wilayah Brasil.

Unimed membuktikan bahwa sistem koperasi dapat menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, efisien, dan manusiawi bebas dari privatisasi maupun intervensi militer. Di tengah dominasi pasar, Unimed berdiri sebagai simbol perlawanannya etis dan keberhasilan model ekonomi solidaritas dalam sektor kesehatan.

³² Duarte CM. 2001. UNIMED: history and characteristics of a Brazilian medical cooperative. Cad Saude Publica. Jul-Aug;17(4):999-1008. Portuguese. doi:10.1590/s0102-311x2001000400034. PMID: 11514881. <https://www.scielo.br/j/csp/a/6d9SpMdkJd9SHWG4vQyHMrf/?lang=pt>



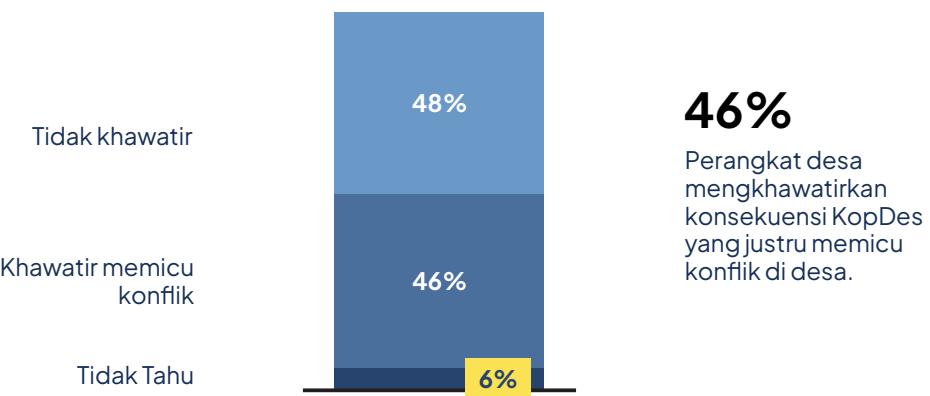
KOPDES MP BERPOTENSI MEMICU KONFLIK DAN MENJADI TENGKULAK BARU

Kopdes MP rentan memantik konflik dan kecemburuan sosial. Sebanyak 46% responden khawatir dengan pendirian Kopdes MP yang dapat memicu konflik di desa.

Selama ini desa berperan vital dalam menghidupi BUMDes di tengah sulitnya akses permodalan, keterbatasan SDM pengelola yang kompeten, dan imbal hasil usaha yang kecil. Pendirian Kopdes MP justru memicu pertanyaan “Apakah Kopdes MP akan menggantikan peran BUMDes?” dan “Bukankah kehadiran Kopdes MP justru tumpang tindih dengan BUMDes dan berpotensi memicu konflik?”.

Di banyak desa, pengurus BUMDes yang selama ini bekerja dengan sumber daya terbatas harus menyaksikan koperasi baru memperoleh modal besar dan sokongan institusional tanpa proses seleksi kinerja yang adil. Ketimpangan ini menjadi pemicu konflik horizontal antar pelaku ekonomi lokal, memperlemah solidaritas sosial, dan pada akhirnya merusak tatanan kelembagaan desa yang seharusnya dibangun secara kolaboratif.

Gambar 14.
Kekhawatiran Publik Mengenai Konflik Dibalik Kopdes MP



Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, “Apakah Anda khawatir bahwa program Kopdes Merah Putih dapat merusak kondisi sosial atau memicu konflik di desa?”. Opsi jawaban meliputi “Ya, Sangat Khawatir”, “Khawatir”, “Tidak Khawatir”, dan “Tidak Tahu”.

“

Kami memaklumi jika pemerintah pusat pusing mengelola puluhan ribu desa di Indonesia. Tapi kami di desa lebih pusing lagi apabila kebijakan disamakan untuk semua daerah yang sebenarnya berbeda.

Perangkat Desa di Bangka Belitung

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, terdapat pernyataan bahwa “Munculnya Kopdes MP akan semakin membuat BUMDes tidak berkembang dan ditinggalkan” (Perangkat Desa di Papua Barat). BUMDes dan KUD yang selama ini dipertahankan dengan suntikan dana desa menunjukkan sulitnya mengembangkan kemandirian usaha di desa. Perangkat desa juga menerangkan bahwa “ketidaksiapan pemerintah desa ditambah dengan SDM yang sebagian besar berpendidikan rendah di desa akan rentan atas konflik” (Perangkat desa, Sulawesi Utara). Kondisi saling curiga antara masyarakat dan aparatur desa juga menguat seiring dengan besarnya aliran dana pada fase awal pendirian Kopdes MP.

“

Pusat itu jelasnya donatur boleh ngatur. dana desa selama ini dipenuhi tuntutan pusat untuk ketahanan pangan melalui penyertaan modal pada BUMDes. Ketika BUMDesnya sudah ada malah minta buatkan lagi Kopdes MP.

Perangkat Desa di D.I. Yogyakarta

Tidak hanya itu, ketika Kopdes MP didukung penuh oleh anggaran pemerintah dan fasilitas negara, seperti subsidi, kredit lunak, serta distribusi dari BUMN, koperasi ini dapat menjual barang dengan harga jauh lebih murah daripada toko kecil milik warga lokal. Akibatnya, toko-toko kecil kehilangan pelanggan, mengalami penurunan pendapatan, bahkan gulung tikar. Ketimpangan ini memicu kecemburuhan sosial dan rasa ketidakadilan karena pelaku usaha lokal merasa disaingi secara tidak sehat oleh lembaga yang disokong negara. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menimbulkan konflik horizontal antara pengurus koperasi dan warga desa lainnya yang merasa dirugikan secara ekonomi maupun sosial.

“

Jika koperasi ini berhasil, yang akan dinyatakan berhasil adalah pemerintah pusat tanpa menyanjung pemerintah desa. Hal ini hanya untuk citra pemerintah pusat.

Perangkat Desa di Sumatera Utara

Konflik juga kemungkinan muncul ketika proyek-proyek dalam Kopdes MP hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kepala desa. Ketidaksetaraan akses ini menimbulkan kecemburuhan, ketidakpercayaan, dan perpecahan sosial, yang bisa berkembang menjadi penolakan terhadap koperasi, boikot kegiatan desa, atau bahkan konflik terbuka antarwarga. Kondisi ini memperlemah solidaritas sosial dan mengganggu stabilitas pembangunan di tingkat lokal.

Biaya konflik yang membayangi implementasi Kopdes MP tak pernah dihitung dalam desain program.

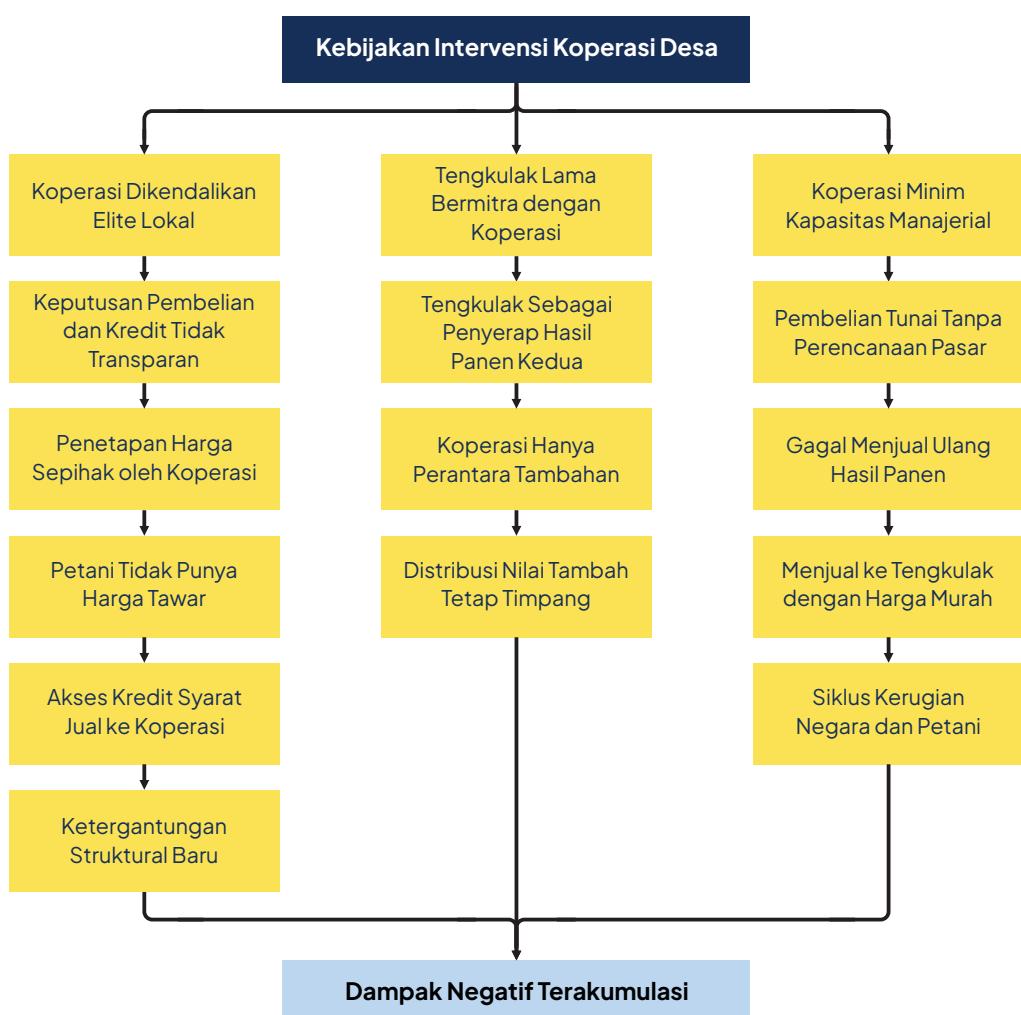
Apakah Kopdes MP bisa menghapus tengkulak? Atau malah berubah wujud jadi tengkulak berseragam?

Alih-alih menghapus peran tengkulak, Koperasi Desa Merah Putih justru berpotensi mereproduksi praktik serupa dalam struktur kelembagaan formal. Dengan skema pembentukan koperasi saat ini, ada kemungkinan koperasi dikendalikan oleh elite lokal atau aparat desa yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tersendiri. Tanpa mekanisme partisipatif dan transparan, posisi petani tetap lemah dalam rantai pasok, dan koperasi menjadi alat kontrol alih-alih pemberdayaan.

Lebih jauh, keberadaan tengkulak tidak benar-benar tersingkir, melainkan bermitra secara informal dengan koperasi. Tengkulak lama tetap menjadi penyerap utama ketika koperasi gagal menjual hasil panen ke pasar, memanfaatkan jaringan distribusi yang telah mereka kuasai. Sementara itu, karea baru dibentuk, akan ada banyak Kopdes MP yang tidak memiliki kapasitas manajerial, sistem pemasaran, atau logistik yang memadai. Hasil panen yang dibeli dari petani akhirnya dijual kembali ke tengkulak dengan harga murah, menyebabkan kerugian yang dibebankan kembali ke petani melalui pemotongan kredit atau pembatasan akses di musim tanam berikutnya. Dalam situasi ini, koperasi tidak hanya gagal menjadi solusi, tapi justru memperpanjang dan memperumit masalah struktural yang telah lama membelenggu petani kecil.

Gambar 15.

Alur Dampak Negatif Intervensi Koperasi Desa dalam Ekosistem Pertanian





KOPDES MP JADI ALAT KONSOLIDASI POLITIK JELANG PEMILU 2029

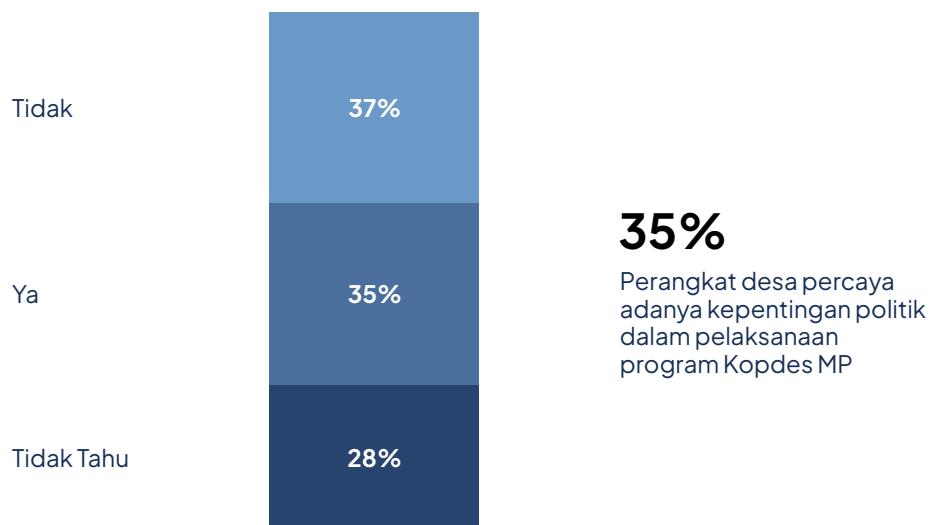
Studi ini menunjukkan bahwa 35% persen responden menganggap program Kopdes MP ini sarat kepentingan politik.

Setiap koperasi wajib memiliki minimal lima pengurus dan tiga pengawas, dengan Kepala Desa ditetapkan secara *ex officio* sebagai Ketua Koperasi (Menteri Koperasi, 2025)³³. Dengan target pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, setidaknya akan ada 400.000 orang pengurus dan 160.000 orang pengawas yang terlibat secara formal dalam struktur kelembagaan koperasi.

Potensi manuver politik terbentuk dari jaringan pengurus dan anggota Kopdes MP. Mereka bisa dimobilisasi untuk kepentingan politik, misalnya mendukung calon tertentu dalam pemilu, atau digunakan untuk mengontrol sikap masyarakat di desa. Karena koperasi ini dibentuk dari atas dan melibatkan langsung pejabat pemerintah, bentuknya lebih mirip alat kekuasaan daripada koperasi yang lahir dari inisiatif warga.

Dampaknya tidak hanya pada kinerja ekonomi koperasi yang bisa melemah karena tujuannya bercampur dengan politik. Yang lebih berbahaya, struktur sosial desa bisa terganggu. Koperasi bisa menciptakan pembelahan di masyarakat, antara yang dianggap "loyal" dan yang "tidak mendukung." Selain itu, pemerintah desa bisa kehilangan independensinya, karena keputusan-keputusan penting justru ditentukan berdasarkan kepentingan politik, bukan kebutuhan warganya.

Gambar 16.
Persepsi Terkait Kepentingan Politik Kopdes MP



Sumber: Penulis. N=108. Responden ditanyakan, "Apakah menurut Anda Kopdes Merah Putih merupakan program yang sarat dengan kepentingan politik?". Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak Tahu".



Ada kepentingan politik, tapi saya tidak bisa menjelaskan.

Perangkat Desa di Kalimantan Timur

³³ Menteri Koperasi, Op. Cit., 8.

Koperasi Merah Putih Bisa Menang Berapa Kursi DPR sih?

Munculnya Kopdes MP sebagai jaringan koperasi berskala nasional memiliki dampak politik yang besar terutama dalam konteks pemilihan legislatif. Dengan asumsi setiap koperasi memiliki sekitar 100 anggota dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 70%, kekuatan politik kolektif ini mampu menghasilkan 34 hingga 46 kursi di DPR, tergantung pada jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Dalam kontestasi yang lebih sederhana, misalnya hanya dua kelompok partai yang bertarung dalam pemilu (incumbent vs. oposisi), pengaruh Kopdes MP bisa lebih besar dan menentukan. Dalam kontestasi antara dua partai saja, partai yang didukung oleh Koperasi Merah Putih akan memenangkan 46 kursi. Sementara itu, dalam kontestasi antara 8 partai, partai yang didukung oleh Koperasi Merah Putih akan memenangkan 34 kursi.

Studi ini juga menyiratkan bahwa daerah terluar di Indonesia dengan kepadatan masyarakat yang rendah seperti Aceh dan Papua menjadi wilayah yang paling rentan untuk terjadinya kampanye politik dengan menyalahgunakan jejaring Kopdes MP, dibandingkan daerah yang lebih heterogen dan dengan literasi politik lebih tinggi.

Institusionalisasi Kopdes MP yang bersifat *top-down* membuka celah praktik politik uang yang terselubung. Pertama, koperasi dapat menjadi saluran politik uang terselubung dengan menyamaran bantuan usaha atau simpan pinjam sebagai program pemberdayaan, padahal diarahkan untuk membeli suara, dan itu menjadi kecurangan transaksi politik yang sulit dibuktikan secara hukum. Kedua, hal ini menciptakan ketimpangan representasi politik karena kursi legislatif dimenangkan bukan berdasarkan ideologi atau program kerja, melainkan loyalitas atas bantuan ekonomi.

Asumsi Dasar Kebijakan

- 1 Simulasi data DPT menggunakan jumlah populasi di Susenas
- 2 Tingkat partisipasi di Pileg sekitar 70%
- 3 Perhitungan suara dilakukan menggunakan metode *Sainte-Lague*³⁴
- 4 Setiap koperasi diasumsikan memiliki 100 anggota
- 5 Dalam simulasi 1 koalisi partai yang beroposisi dengan partai pengendali Kopdes MP
- 6 Dalam simulasi 8 partai “Partai Kopdes MP” dilempar dengan 7 partai lain yang berkoordinasi untuk membagi suara secara setara antara 7 partai tersebut

³⁴ Metode Sainte-Laguë adalah sistem pengubah suara menjadi kursi legislatif yang diterapkan di Indonesia. Metode ini membagi jumlah suara partai menggunakan bilangan ganjil (1, 3, 5, dan seterusnya) untuk menentukan pemenang kursi di lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan DPD.

Tabel 7.
Proporsi Kursi Legislatif yang dapat dimenangkan melalui Konsolidasi Kopdes MP

Provinsi	Jumlah Kursi DPR	% Suara Pemilih	Simulasi 2 Partai	Simulasi 8 Partai
Aceh	13	25%	4	4
Sumatera Utara	20	8%	3	3
Sumatera Barat	14	4,5%	1	0
Riau	11	5,6%	1	0
Jambi	8	8,6%	1	1
Sumatera Selatan	17	7,4%	2	1
Bengkulu	4	14,2%	1	1
Lampung	20	5,8%	2	0
Kepulauan Bangka Belitung	3	5,4%	0	0
Kepulauan Riau	3	4,1%	0	0
DKI Jakarta	8	0,5%	0	0
Jawa Barat	91	2,4%	3	2
Jawa Tengah	77	4,3%	4	3
DI Yogyakarta	9	2,2%	0	0
Jawa Timur	87	3,9%	4	3
Banten	22	2,5%	1	0
Bali	9	3,1%	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	4,3%	0	0
Nusa Tenggara Timur	13	12,2%	2	2
Kalimantan Barat	8	9,9%	1	1
Kalimantan Tengah	6	11,9%	1	1
Kalimantan Selatan	8	9,5%	1	1
Kalimantan Timur	8	5,5%	0	0
Kalimantan Utara	3	13,8%	1	1
Sulawesi Utara	6	13,3%	1	1
Sulawesi Tengah	8	12,8%	1	1
Sulawesi Selatan	20	6,6%	2	1
Sulawesi Tenggara	6	17,6%	1	1
Gorontalo	3	11,6%	0	0
Sulawesi Barat	3	9,8%	0	0
Maluku	4	13,4%	1	1
Maluku Utara	3	19,8%	1	1
Papua	10	4,6%	0	0
Papua Barat	3	13,2%	1	1
Papua Selatan	3	40%	2	1
Papua Tengah	4	8,5%	0	0
Papua Pegunungan	3	16,6%	1	1
Papua Barat Daya	3	62,9%	2	1
Total			46	34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Diolah).

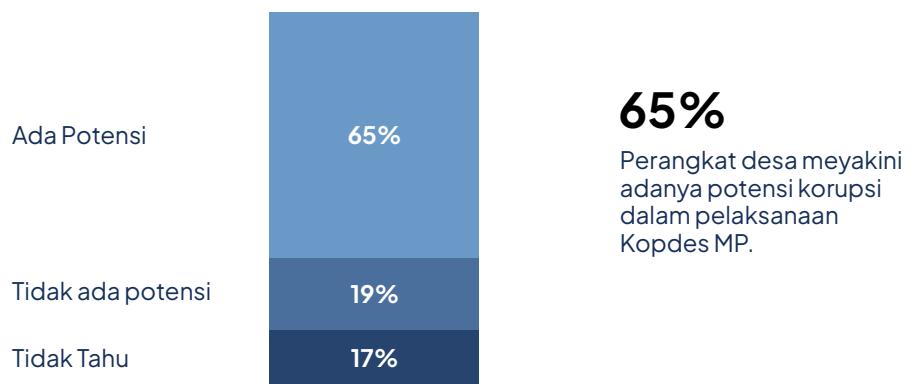
Catatan: Data jumlah pemilih total disimulasikan menggunakan Survei Ekonomi Nasional sementara jumlah desa diambil berdasarkan survei Potensi Desa.

“

Tidak urgent mendirikan Kopdes MP ini. Kami sudah punya BUMDes. Kemungkinan program ini politis.

Perangkat Desa di Bali

Gambar 17.
Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Kopdes MP



Sumber: Penulis. Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, “Apakah Anda melihat potensi terjadinya koperasi dalam pengelolaan Kopdes MP?”. Opsi jawaban meliputi “Ada Potensi”, “Tidak Ada Potensi”, dan “Tidak Tahu”.

Sebanyak 65% atau mayoritas perangkat desa menilai adanya potensi korupsi dalam program **Kopdes MP**, Penyebabnya karena program ini membutuhkan anggaran yang besar, tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai dan mekanisme transparansi yang kuat. Minimnya akuntabilitas juga dapat menciptakan celah bagi penyimpangan anggaran dan intervensi politik.

“

Koperasi ini adalah kebijakan politik dan menterinya tidak memiliki kompetensi dalam hal koperasi.

Perangkat Desa di D.I. Yogyakarta

Proyek Hambalang Versi Desa

Berdasarkan juklak yang dirilis pemerintah pusat, setiap desa seakan dipaksa untuk mendorong Kopdes MP untuk melakukan pembangunan gudang secara kolektif oleh beberapa desa dan kemudian dibayar menggunakan dana desa. Desa dipaksa bekerja sama, antara lima hingga sepuluh desa, untuk menanggung biaya pembangunan gudang senilai Rp400 juta per tahun. Meskipun dibagi rata, tetapi saja penggunaan Gedung ini adalah bentuk pemaksaan alokasi yang tidak sensitif terhadap prioritas lain di tingkat desa, seperti layanan dasar, kesehatan, atau pertanian.

Jika tidak diawasi secara ketat, pelaksanaan proyek ini sangat rawan dikendalikan oleh aktor-aktor yang memiliki afiliasi politik dan kedekatan dengan elite lokal. Proyek ini berpotensi menjadi bantuan baru bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari skema anggaran desa, mengulangi pola-pola korupsi dan penyelewengan dana seperti yang pernah terjadi pada proyek-proyek nasional bermasalah. Berbeda dengan proyek Hambalang yang menjadi proyek skala besar dan koruptif, kali ini terjadi dalam skala mikro, menyusup ke desa-desa dengan wajah pembangunan.

Ini bukan pembangunan, ini pemaksaan infrastruktur yang menjadikan Dana Desa sebagai ATM politik dan pundi ekonomi segelintir orang, jelas yang dirugikan adalah masyarakat desa itu sendiri.



 Dokumentasi CELIOS

“

*Pengaruh pusat itu kuat sekali,
saya pikir memang karena
politik program Kopdes ini ada.*

(Perangkat desa di Bengkulu)



REKOMENDASI KEBIJAKAN: MEMBESARKAN KOPERASI TANPA MERUSAK DESA

- 1 **Bank Indonesia dan OJK direkomendasikan agar segera membuat *stress test* dan mitigasi terhadap risiko sistemik bank BUMN akibat pemberian ke Kopdes MP**
- 2 **Model Pemberian Koperasi yang Inklusif**

Koperasi, seperti banyak entitas lainnya, membutuhkan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Namun berbeda dengan perusahaan konvensional, koperasi menempatkan kolektivitas, inklusivitas, dan kemandirian anggota sebagai prinsip utama. Skema pemberian yang ideal bagi koperasi adalah *blended finance*, yaitu kombinasi seimbang antara sumber daya internal dan eksternal, sehingga risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan tunggal dapat diminimalisir

Aksesibilitas pemberian juga harus minim diskriminasi dan tanpa prasyarat profitabilitas tinggi atau jaminan aset besar untuk memastikan partisipasi kolektif dan keadilan ekonomi.

Tidak hanya itu, koperasi juga harus mendorong kepemilikan anggota yang sesungguhnya melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keuangan. Partisipasi ini harus inklusif, tanpa diskriminasi. Beberapa potensi pemberian untuk koperasi dapat terus ditingkatkan:

Tabel 8.
Skema Pembiayaan Pihak Ketiga, Aset Bersama, dan Partisipasi Anggota

Pembiayaan Pihak Ketiga

Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Skema subsidi 1:1 dari pemerintah/lembaga lain (hibah, pinjaman lunak, modal) dengan proses seleksi ketat. <i>Crowdfunding</i> menggunakan <i>platform</i> untuk modal dari masyarakat umum khusus proyek sosial/ekonomi. <i>Peer-to-peer lending digital</i> antar anggota dengan bunga rendah dan transparansi.	Koperasi mengumpulkan dana Rp500 juta dari anggota atau mitra, Pemerintah memberikan <i>matching fund</i> Rp500 juta (rasio 1:1). Total dana yang dapat digunakan koperasi menjadi Rp1 miliar. Koperasi ekonomi kreatif pakai <i>Kitabisa</i> untuk penggalangan dana masyarakat. <i>P2P lending</i> koperasi untuk akses pinjaman cepat.

Pembiayaan Berdasarkan Aset Bersama

Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Menggunakan aset kolektif (tanah, bangunan) sebagai jaminan pinjaman eksternal, bunga rendah. Sistem kumpulan aset anggota sebagai jaminan bersama untuk pembiayaan lebih baik.	Koperasi petani menggunakan gudang panen sebagai jaminan kolektif pinjaman bank. Koperasi perumahan mengumpulkan aset rumah sebagai jaminan kredit renovasi.

Pembiayaan Berdasarkan Partisipasi Anggota

Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Anggota membeli saham untuk membiayai proyek koperasi, berhak suara dan keuntungan. Sistem poin atau kredit untuk anggota aktif, bisa ditukar dengan layanan atau pinjaman.	Koperasi karyawan BUMN menjual saham untuk pendanaan fasilitas bersama. Koperasi konsumen memberikan poin bagi anggota yang aktif bertransaksi.

Pembiayaan Berkelanjutan

Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pertanian organik. Obligasi sosial/sukuk untuk proyek dengan target sosial, hasil bagi berdasarkan pencapaian.	<i>Green financing</i> untuk koperasi pertanian organik dengan pinjaman lunak dan hibah. <i>Social Impact Bonds</i> untuk pelatihan pemuda miskin oleh koperasi pendidikan

Pembiayaan Digitalisasi Koperasi

Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Aplikasi mobile/e-wallet untuk transaksi mudah dan akses pembiayaan. Integrasi produk koperasi ke e-commerce untuk pemasaran dan pembiayaan pengembangan usaha digital.	Platform pembayaran digital koperasi UMKM di Jogja. Koperasi kerajinan tangan bermitra dengan pihak swasta untuk pemasaran dan modal usaha.

Sistem Pembiayaan Perbankan

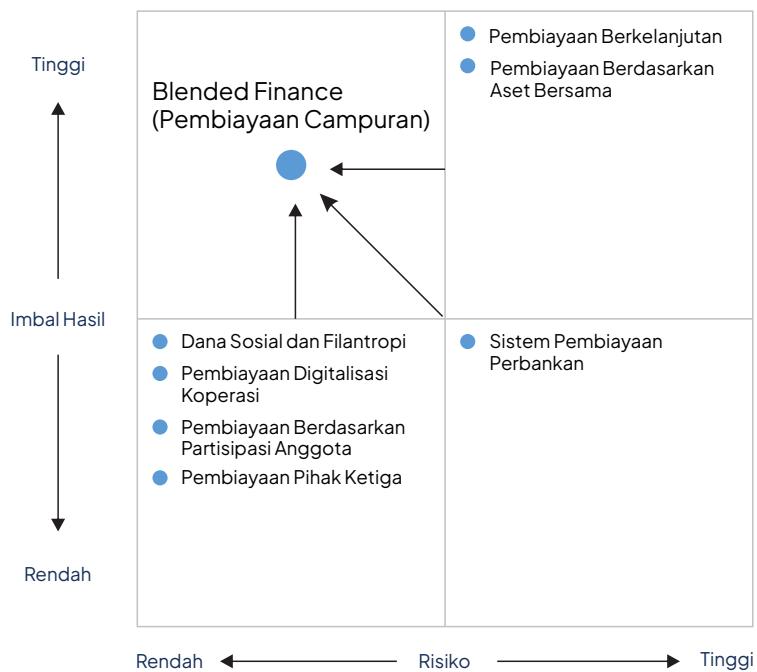
Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Pinjaman bank dengan bunga lunak, bisa didukung jaminan aset kolektif dan subsidi pemerintah. Kerjasama bank dengan koperasi untuk layanan kredit modal kerja dan investasi dengan proses digital.	Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk koperasi, dibantu agunan kolektif dan subsidi bunga dari pemerintah. Bank Himbara bermitra dengan koperasi di daerah untuk fasilitasi kredit anggota.

Dana Sosial dan Filantropi

Jenis Pembiayaan	Contoh Pembiayaan
Dana filantropi dengan orientasi dampak sosial bukan finansial. Dana sosial yang dikumpulkan komunitas, yayasan, atau pemangku kepentingan untuk membiayai koperasi dengan misi sosial.	Hibah, pinjaman lunak, atau penyertaan modal tanpa kendali manajemen pada sektor yang berdampak sosial tinggi. Sinergi koperasi dengan zakat, wakaf produktif, CSR, dana pengembangan masyarakat.

Blended finance koperasi menawarkan pendekatan pendanaan yang lebih berkelanjutan dibandingkan model Kopdes MP ala Prabowo. *Blended finance* memperluas akses modal koperasi, menurunkan risiko pembiayaan, dan mendorong inovasi produk keuangan. Selain itu, keterlibatan investor swasta dan donor mendorong tata kelola yang lebih akuntabel serta peningkatan kapasitas manajemen koperasi melalui transfer pengetahuan. Model ini juga memperkecil risiko ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, menjadikan koperasi lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Gambar 18.
Peta Keunggulan Blended Finance



Peta skema pembiayaan koperasi inklusif menunjukkan bahwa masih banyak potensi pembiayaan yang bisa diimplementasikan, namun kebanyakan pendanaan memiliki imbal hasil yang rendah. Selain itu, terdapat beberapa pendanaan yang berimbal hasil tinggi, namun memiliki risiko yang tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan skema *blended finance* atau pembiayaan campuran untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keberhasilan program usaha. Skema ini mengambil keberhasilan ide pembiayaan yang banyak dikembangkan dalam rangka mencapai misi selain profit dan investasi tradisional semata, namun misi sosial, solidaritas, dan misi lingkungan.

Koperasi butuh suntikan modal, tapi harus dengan pengawasan



Agar kualitas SDM lebih baik lagi, perlu ada pelatihan. Modal perlu ditambah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tidak perlu berlebihan dan harus ada evaluasi.

Perangkat Desa di D.I. Yogyakarta

Tabel 9.
Keuntungan penerapan pembiayaan campuran (blended finance)

	Blended Finance Koperasi	Model Koperasi Desa Merah Putih Prabowo
Sumber Modal	Kombinasi dana publik & swasta	Dana pemerintah/subsidi dominan
Keberlanjutan	Modal besar dan berkelanjutan	Bergantung pada program politik, kurang berkelanjutan
Manajemen & Tata Kelola	Profesional, diawasi ketat dan transparan	Rentan politisasi, kurang transparan
Risiko Ketergantungan	Rendah karena sumber dana beragam	Tinggi, tergantung subsidi
Inovasi Produk	Mendorong inovasi produk keuangan	Terbatas, mengikuti kebijakan pemerintah
Dampak pada Koperasi	Likuiditas dan kapasitas manajemen meningkat	Modal besar tapi rentan ketergantungan
Dampak pada Desa	Dorong kemandirian dan pengelolaan usaha profesional	Rentan ketergantungan dan politisasi
Keterlibatan Komunitas	Inklusif dan partisipatif	Top-down, kurang partisipasi

Koperasi bisa menghasilkan sepanjang pemasarannya dipikirkan



Kami punya hasil itu pala, pemasarannya selama ini dibantu BUMKam (seperti BUMDes). Kopdes MP ini bagaimana kah? kalau boleh kami punya usul, itu bisa jadi penghubung dari kelompok usaha yang masyarakat punya dan datangkan komoditas yang tidak ada di kampung.

Perangkat Desa di Bali

Simulasi Pembiayaan Koperasi yang Inklusif : Kombinasi Inisiatif Internal dan Stimulus Eksternal

Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, koperasi memainkan peran strategis sebagai motor penggerak usaha bersama. Skema pembiayaan koperasi yang inklusif tidak hanya mengandalkan satu sumber dana, tetapi memadukan kekuatan internal dan eksternal secara sinergis.

Dari sisi dana internal, kontribusi anggota menjadi sumber dan inisiatif utama. Dengan simulasi jumlah anggota sebanyak 100 orang, masing-masing memberikan modal awal sebesar Rp 1.000.000 dan iuran rutin bulanan sebesar Rp 100.000. Ini menghasilkan kontribusi tetap sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Dengan asumsi koperasi diproyeksi memperoleh laba tahunan dari penjualan produk sebesar Rp 500 juta. Sebanyak 30% dari laba sebesar Rp 150 juta per tahun atau Rp 12,5 juta per bulan dialokasikan untuk modal kerja dan investasi berkelanjutan.

Sementara itu, dana eksternal dapat diperoleh dari tiga sumber utama. Pertama, koperasi bisa mengakses pinjaman bank sebesar Rp 200 juta dengan bunga 5% per tahun, sehingga angsuran tetap sekitar Rp 3.773.907 per bulan selama lima tahun. Kedua, koperasi bisa mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 150 juta dari investor sosial yang tidak mengharapkan keuntungan finansial, melainkan berfokus pada dampak sosial yang dihasilkan. Ketiga, dari pemerintah, koperasi menerima dua skema pembiayaan: hibah sebesar Rp 100 juta tanpa kewajiban pengembalian dan pinjaman bersubsidi sebesar Rp 100 juta dengan bunga 3% per tahun dengan angsuran sekitar Rp 1.798.205 per bulan.

Jika dihitung secara keseluruhan, total pembiayaan koperasi per bulan mencapai Rp 28.072.112. Angka ini terdiri dari Rp 22.500.000 dari dana internal (kontribusi anggota dan alokasi laba) serta Rp 5.572.112 dari dana eksternal (pinjaman bank, investor sosial dan pemerintah). Dalam satu tahun, koperasi akan memiliki total dana pengembangan sebesar Rp 336.865.344.

Dana tersebut kemudian diputar dalam usaha dengan prinsip efektif, efisiensi dan *going concern*. Sebanyak 40% (Rp 134.746.138) dialokasikan untuk modal kerja operasional, 40% lainnya untuk investasi pengembangan usaha, dan 20% sisanya (Rp 67.373.069) disiapkan sebagai cadangan pengembalian pinjaman dan bunga.

Melalui pendekatan inklusif ini, koperasi tidak hanya mampu mengelola pembiayaan secara sehat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif anggotanya, membuka ruang kolaborasi dengan pihak eksternal, dan menjaga kesinambungan usaha.

“

Semakin banyak program maka semakin bagus. Namun, kami sebagai pelaksana program perlu di survei dahulu karena keunikan kondisi di desa. Kami ini hanya sami'na wa atho'na tanpa bisa merealisasikannya.

Perangkat Desa di Bangka Belitung

3

Keberpihakan Negara pada Penciptaan Pasar yang Adil untuk Koperasi

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) berpotensi mengulang kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru, jika negara kembali mengadopsi model bisnis koperasi yang hanya menjadikan koperasi sebagai perpanjangan tangan distribusi program subsidi. Yang dibutuhkan adalah penciptaan pasar yang adil, akses distribusi yang terlindungi dari dominasi korporasi besar, serta regulasi yang memberi insentif terhadap praktik ekonomi kolektif.

Langkah konkret yang dapat dilakukan negara dapat berupa:



Membuat regulasi afirmatif yang melindungi ruang pasar koperasi dari dominasi jaringan ritel besar.



Memberikan insentif fiskal (pengurangan pajak atau dana pendamping logistik) bagi koperasi yang memasuki pasar distribusi modern.



Mengintervensi struktur harga agar koperasi bisa bersaing sehat, bukan kembali terjebak dalam lingkaran setan yang sama yaitu biaya produksi tinggi dan harga jual rendah karena struktur pasar yang cenderung oligopolistik.



Kita di Papua masih butuh pembangunan. Kalau semua program itu seragam dari pusat, tidak perlu lagi dikasih pilih itu kepala kampung.

Perangkat Desa di Papua Barat

FairPrice Express



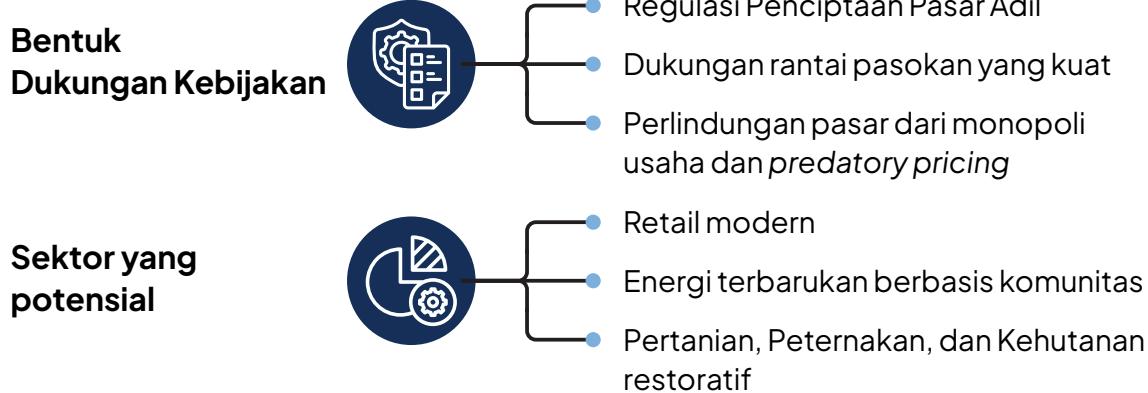
**24
HOURS**

- GROCERIES
- FRESH
- BAKERY
- SNACKS
- COFFEE & TEA
- ATM

Perjuangan Koperasi di Singapura dalam Mengusahakan Rantai Pasokan dan Pasar yang Adil

Salah satu contoh atau *benchmark* yang bisa dicontoh adalah koperasi retail modern di Singapura bernama *National Trade Union Congress* (NTUC)³⁵. Dibentuk oleh *Singapore Trades Union Congress* (STUC) pada tahun 1961 untuk menciptakan harga yang adil bagi para pekerja dan masyarakat. Pendekatan koperasi yang memberi ruang pada produk rumahan/lokal, membentuk harga produk yang kompetitif dan terjangkau, dan pendekatan retail modern yang selalu berinovasi membuat toko retail modern NTUC mampu menguasai pasar di Singapura dengan memiliki 370 outlet dan menguasai 50% lebih pangsa pasar.

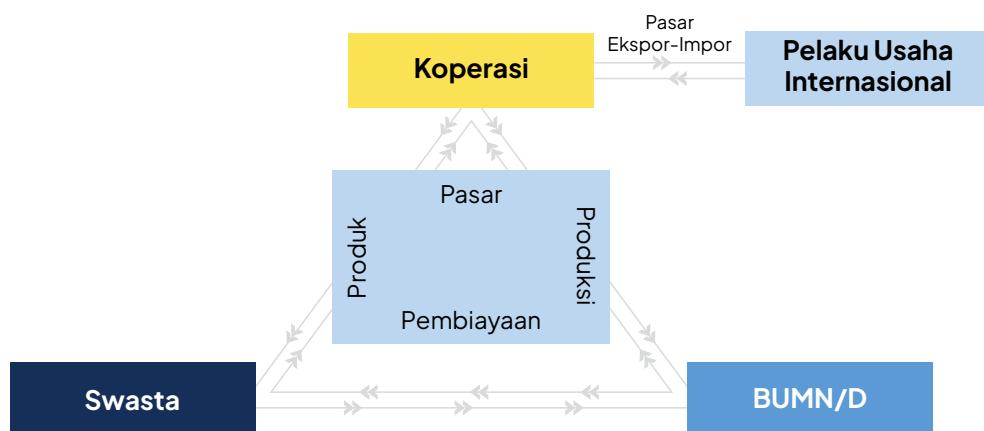
³⁵ NTUC. 2024. Welcome to FairPrice: More than just a supermarket. <https://www.ntuc.org.sg/uportal/news/welcome-to-fairprice-more-than-just-a-supermarket/>



Kerjasama koperasi-swasta-BUMN/D dapat terus didorong untuk memperluas akses pasar dan teknologi. Pelibatan BUMDes dilakukan dalam konteks memperkuat koperasi, bukan memunculkan lembaga baru.

Koperasi petani dapat bermitra dengan perusahaan pupuk untuk mendapatkan pupuk secara langsung sekaligus pelatihan pemupukan ideal. Di sektor peternakan, koperasi susu rakyat dapat menandatangani kontrak pasokan dengan perusahaan seperti susu swasta, yang tidak hanya menjamin pasar tetap, tetapi juga menyediakan teknologi penyimpanan dingin dan standar mutu produk. Sementara di sektor kelautan, koperasi nelayan dapat mengandeng startup *e-commerce seafood* untuk mendigitalisasi penjualan hasil tangkapan langsung ke pasar kota besar, tanpa perantara.

Gambar 19.
Kolaborasi Antar Entitas Koperasi, Swasta, dan BUMN/D



Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh koperasi. Kebijakan dan intervensi harus berbasis jenis koperasi dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan seragam justru berisiko melemahkan efektivitas dan keberlanjutan koperasi.

Tabel 10.
Identifikasi Masalah dan Solusi dalam Variasi Unit Usaha Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Contoh Masalah	Solusi
Kredit macet tinggi karena lemahnya analisis kelayakan peminjam	Perkuat sistem penilaian risiko kredit dan pelatihan manajemen risiko bagi pengurus

Koperasi Konsumen

Contoh Masalah	Solusi
Barang yang dijual kalah bersaing dengan minimarket modern	Bangun kemitraan dengan produsen lokal, modernisasi usaha & digitalisasi katalog produk

Koperasi Produsen (Tani/Nelayan)

Contoh Masalah	Solusi
Petani kesulitan akses pasar dan harga tidak stabil	Bentuk kemitraan pemasaran, bangun gudang bersama, dan akses ke platform digital

Koperasi Pekerja/Buruh

Contoh Masalah	Solusi
Anggota kurang memiliki keterampilan manajerial	Beri pelatihan manajemen bisnis dan manajemen organisasi kolektif

Koperasi Jasa (Transportasi, dll)

Contoh Masalah	Solusi
Persaingan dari aplikasi <i>ride-hailing</i> dan lemahnya posisi tawar	Bangun platform digital sendiri dan perkuat payung hukum koperasi jasa

Koperasi Serba Usaha (KSU)

Contoh Masalah	Solusi
Terlalu banyak unit usaha tanpa pengelolaan profesional	Fokuskan pada unit usaha yang paling potensial dan rekrut manajer profesional

Koperasi harus melihat keunikan desa. Klasterisasi menjadi penting



Pengembangan koperasi desa berbasis potensi lokal dapat dilakukan melalui pendekatan Klasterisasi, yang mengelompokkan koperasi sesuai karakter unik dan kondisi wilayahnya, baik dari sisi ekonomi, sosial-budaya, geospasial, maupun kapasitas inovasi. Secara umum, terdapat sembilan klaster utama yang dapat menjadi landasan arah pembinaan dan intervensi kebijakan koperasi.

Pertama, klaster agrokomoditas mencakup koperasi-koperasi produsen yang mengelola komoditas pertanian dan perkebunan seperti kopi, kakao, dan hortikultura, dengan fokus pada penguatan rantai pasok dan pasca-panen. Kedua, klaster agro-maritim mencakup koperasi nelayan dan koperasi pengolahan hasil laut yang berbasis pada sumber daya pesisir dan perikanan budidaya, seperti rumput laut dan ikan. Ketiga, klaster peternakan rakyat berfokus pada koperasi peternak skala kecil untuk komoditas seperti sapi perah, kambing, dan unggas.



Pemerintah harus lebih selektif dalam memprioritaskan pengembangan Kopdes MP ini sesuai dengan potensi di setiap wilayah. Tinggal baca RPJMDes yang dibuat dengan waktu dan tahapan panjang itu.

Perangkat Desa di Gunungkidul

Selanjutnya, klaster industri kreatif dan kerajinan mencakup koperasi perajin yang mengelola produk lokal seperti anyaman, batik, dan tenun, dengan prioritas pada inovasi desain dan akses pasar. Klaster pariwisata komunitas melibatkan koperasi wisata dan koperasi multiguna di desa-desa yang memiliki kekayaan budaya atau ekowisata, seperti desa adat atau kawasan pegunungan. Di sisi lain, klaster pangan lokal dan kuliner tradisional menampung koperasi pengolahan pangan yang melestarikan makanan khas desa melalui dapur kolektif dan pengemasan modern.

Kemudian, klaster energi dan ekologi mencakup koperasi yang mengelola sumber energi alternatif atau menjaga kawasan ekologi desa, seperti PLTMH dan konservasi hutan desa.

Klaster digital dan teknologi inklusif mencakup koperasi pemuda dan koperasi digital yang memanfaatkan literasi dan inovasi teknologi desa untuk jasa IT, platform digital, dan promosi produk lokal. Terakhir, klaster layanan sosial dan kebutuhan dasar terdiri dari koperasi jasa atau koperasi multiguna yang menyediakan layanan publik seperti air bersih, transportasi desa, atau pendidikan anak usia dini.

Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya dibentuk berdasarkan sektor ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada karakter dan keunikan desa. Klasterisasi ini mendorong pembentukan ekosistem koperasi yang saling melengkapi antarwilayah dan menciptakan rantai nilai desa-kota yang berkelanjutan.

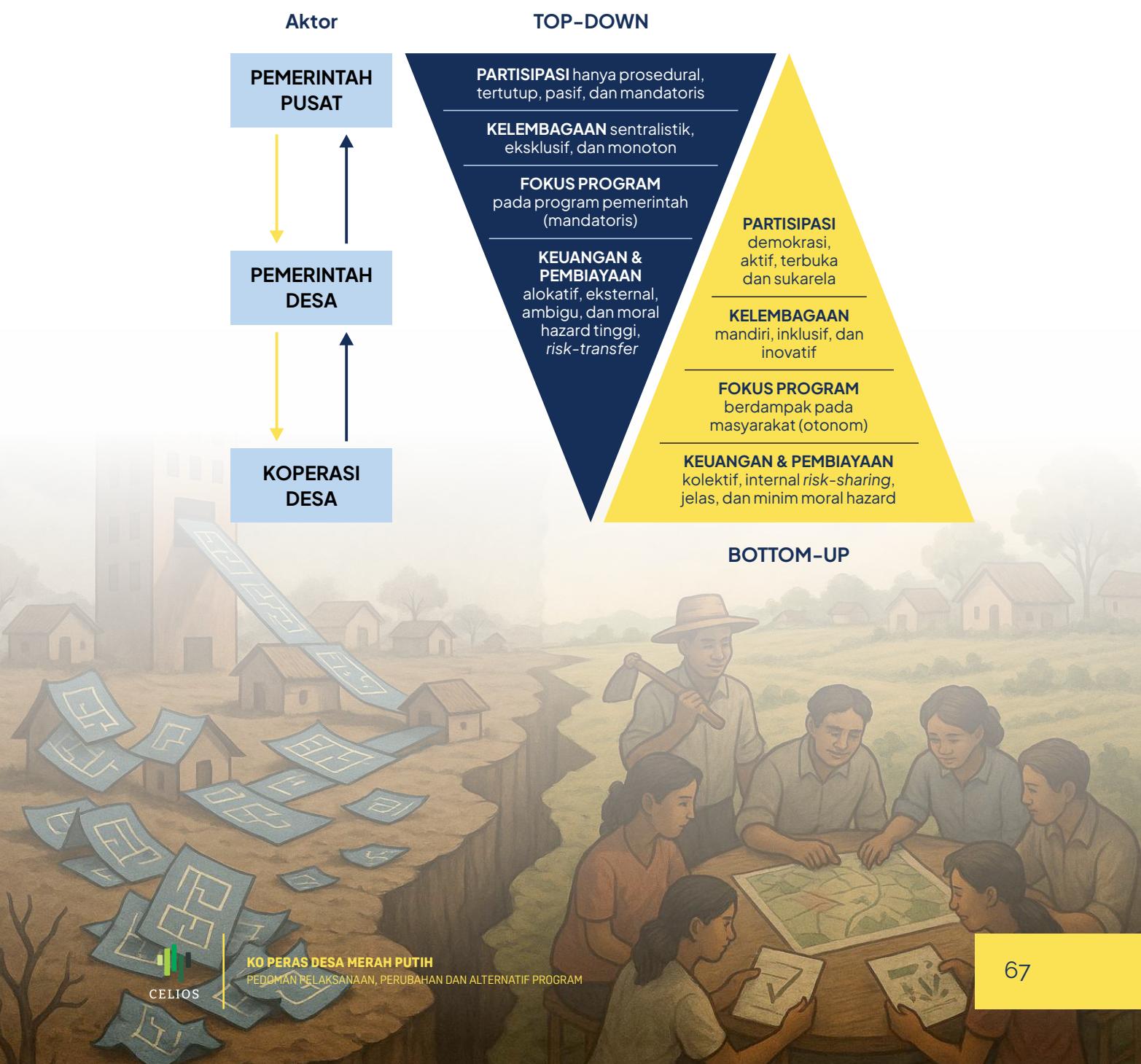
Koperasi Mandiri dan Inovatif

Koperasi yang digagas dalam perekonomian Indonesia seharusnya didorong pada penciptaan koperasi yang mandiri dan inovatif. Mandiri bermakna jauh dari intervensi eksternal terutama pemerintah. Dukungan pemerintah dalam penguatan koperasi lebih pada enabler kebijakan seperti perlindungan pasar dan regulasi yang adil, tidak harus memberikan permodalan besar yang berpotensi membebani pengelola koperasi/masyarakat desa sebagai anggota.

Pendekatan dari bawah (*bottom up*) diperlukan untuk menjawab kebutuhan dan karakteristik unik setiap desa. Pendekatan yang tersentralisasi malah memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembangan koperasi.

Gambar 20.

Perbandingan Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*





Inspirasi Koperasi Mondragon, Spanyol³⁶ sebagai Inovasi Kolektif yang Mandiri

Didirikan pada tahun 1956 di Mondragón, Spanyol, oleh Pastor José María Arizmendiarrieta, koperasi ini lahir sebagai respons terhadap kemiskinan dan pengangguran pasca-Perang Saudara Spanyol. Arizmendi Arrieta mendirikan sekolah teknik untuk memberdayakan pemuda lokal, yang kemudian menjadi cikal bakal koperasi pertama. Filosofinya menekankan pada demokrasi ekonomi, partisipasi pekerja, dan solidaritas sosial

Kemandirian ekonomi lahir dari inovasi kolektif yang menjunjung tinggi solidaritas antar koperasi, penguatan pendidikan, program berbasis dampak, reinvestasi keuntungan atau surplus usaha, dan menjaga kesenjangan upah hingga 1:6. Pekerja bukan pemodal eksternal, tetapi pemilik entitas yang memegang kendali atas keputusan dan kebijakan.

Konsisten prinsip koperasi menghasilkan kesuksesan di bisnis industri papan atas, bank, perusahaan asuransi, supermarket, bisnis pertanian, kesehatan, dan lembaga pendidikan. Beroperasi di empat puluh negara di seluruh dunia dan mengekspor barang ke 150 negara. Memiliki ratusan ribu pekerja dan mampu mengubah daerah Basque yang miskin menjadi salah satu daerah termakmur di Spanyol.

³⁶ Peeters, Marc & Schouteten, Roel. 2024. Lessons from the Mondragón Cooperative Movement. Corporate Rebels. <https://www.corporate-rebels.com/blog/lessons-from-the-mondragon-cooperative-movement>



Kisah Sukses Koperasi Kaset Wai, Thailand³⁷ dengan Kombinasi Inovasi Produk, Branding, dan Distribusi Kolektif

Kaset Wisai Agricultural Cooperative Ltd. adalah koperasi pertanian terkemuka yang berlokasi di Distrik Kaset Wisai, Provinsi Roi Et, Thailand. Koperasi ini memainkan peran penting dalam produksi dan pemasaran beras Hom Mali (beras melati) berkualitas tinggi dari wilayah Thung Kula Rong-Hai (TKR), yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Indikasi Geografis (GI) di Thailand dan Uni Eropa

Kaset Wisai Agricultural Cooperative tidak hanya menjual beras sebagai komoditas biasa, tetapi mengangkatnya menjadi produk bernilai budaya dan identitas lokal. Dengan memanfaatkan status Indikasi Geografis (GI) untuk beras Hom Mali dari kawasan Thung Kula Rong-Hai, koperasi membangun narasi produk yang kuat:

- 1 Beras berasal dari tanah kering unik di Thung Kula Rong-Hai yang menghasilkan aroma khas.
- 2 Produksi mengikuti tradisi lokal dan ekosistem yang dijaga.
- 3 Sertifikasi GI dan PGI menjadi jaminan kualitas di mata konsumen.

Ini membedakan produk mereka dari beras umum di pasar, dan menciptakan nilai tambah berbasis cerita (*story-based branding*). Untuk mempersatukan produk para petani dalam satu identitas kuat, koperasi meluncurkan merek kolektif bernama “Kerd Boon”, yang secara harfiah berarti “Lahir dari Kebajikan”.

Sebelum branding kolektif, petani menjual produk mereka secara terpisah dan bersaing satu sama lain, sering kali merusak harga pasar. Kini, semua penjualan dikonsolidasikan di bawah koperasi dengan mengelola logistik dan pemasaran terpusat, menjual ke koperasi tingkat provinsi dan supermarket besar, dan menyediakan sistem pembagian hasil yang adil kepada petani berdasarkan kontribusi kuantitas dan kualitas. Strategi ini meningkatkan efisiensi ekonomi, stabilitas harga, dan solidaritas antaranggota.

Koperasi Kaset Wai bisa dijadikan contoh bagaimana tanpa intervensi pemerintah pusat, koperasi pertanian bisa dikelola dengan baik dan mandiri. Fungsi koperasi sebagai penyerap gabah juga akan optimal, bukan berdasarkan pada instruksi harga sama tanpa membedakan kualitas gabah.

³⁷ Napasintuwong, Orachos. 2017. The Roles of Agricultural Cooperatives in Certification and Production of Geographical Indication Rice in Thailand, FFTC-AP. <https://ap.fftcc.org.tw/article/1215>

Gambar 21.
Multi Peran Pemerintah



Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi melalui lima fungsi utama. Pertama, sebagai regulator, pemerintah perlu menetapkan aturan hukum yang adil dan tegas untuk menjaga prinsip koperasi yang demokratis dan mencegah penyalahgunaan. Kedua, sebagai fasilitator, pemerintah harus menyediakan pelatihan, literasi keuangan, dan akses informasi pasar serta teknologi bagi anggota koperasi. Ketiga, sebagai pemberi insentif, pemerintah dapat menyalurkan pembiayaan terjangkau, subsidi, dan insentif fiskal untuk koperasi strategis. Keempat, sebagai promotor, koperasi perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan rakyat, bukan sekadar objek program pusat, dengan mengintegrasikannya ke dalam agenda pemberdayaan desa dan UMKM. Terakhir, sebagai mitra strategis, pemerintah cukup mendampingi koperasi dalam perencanaan dan evaluasi tanpa mencampuri operasional harian, serta membuka akses pasar bagi produk koperasi.

“

*Harusnya dilihat dulu
apakah semua desa siap untuk jalankan
KopDes MP ini. Kan sudah lama
penyuluhan pertanian lapangan (PPL)
itu ada di desa-desa.*

*Tapi pendampingan malah cuma pendaatan
dan bimbingan pelaporan anggaran saja.
Padahal pendampingan itu harus
di semua sektor. Masyarakat itu butuhnya
pendampingan dan pendanaan
dalam jangka panjang*

(Perangkat desa di Kalimantan Tengah)

Tabel 11.
Aktualisasi Fungsi, Indikator, dan Pemetaan Stakeholder Pemerintah

Fungsi Pemerintah

Regulator yang adil dan tegas

 Cara yang Dapat Dilakukan <ul style="list-style-type: none"> ● Revisi UU Perkoperasian ● Pemetaan koperasi ilegal ● Penguatan sistem pengawasan berbasis digital 	 Indikator Kuantitatif <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah koperasi aktif sesuai UU (%) ● Kasus koperasi ilegal yang ditindak (per tahun) ● Waktu penyelesaian sengketa (hari) 	 Stakeholder Utama <ul style="list-style-type: none"> ● KemenKopUKM ● KemenKumham ● OJK ● DPR
--	---	---

Fungsi Pemerintah

Fasilitator dan enabler

 Cara yang Dapat Dilakukan <ul style="list-style-type: none"> ● Program pelatihan gratis berbasis kebutuhan ● Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pelatihan ● Digitalisasi koperasi 	 Indikator Kuantitatif <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah anggota koperasi dilatih (orang/tahun) ● Persentase koperasi yang mengakses teknologi/info pasar ● Jumlah koperasi dalam rantai pasok nasional/global 	 Stakeholder Utama <ul style="list-style-type: none"> ● KemenKopUKM ● Kemendikbud ● Kemenperin ● Swasta ● Lembaga pelatihan ● Universitas
--	---	---

Fungsi Pemerintah

Pemberi insentif & dukungan finansial

 Cara yang Dapat Dilakukan <ul style="list-style-type: none"> ● Penyaluran dana bergulir berbasis kinerja ● Fasilitasi pajak koperasi produktif ● Pendampingan koperasi pemula 	 Indikator Kuantitatif <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah koperasi penerima KUR, LPDB (unit/tahun) ● Nilai dana bergulir (Rp) ● Koperasi penerima insentif fiskal (unit) 	 Stakeholder Utama <ul style="list-style-type: none"> ● Kemenkeu ● KemenKopUKM ● Perbankan Himbara ● DJPp ● Bea Cukai
---	--	--

Fungsi Pemerintah

Promotor koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat

 Cara yang Dapat Dilakukan <ul style="list-style-type: none"> ● Integrasi koperasi dalam program Dana Desa ● Insentif bagi desa yang mendorong koperasi ● Kampanye koperasi di desa 	 Indikator Kuantitatif <ul style="list-style-type: none"> ● Persentase desa dengan koperasi dalam RPJMDes ● Koperasi dalam program ketahanan pangan ● Kontribusi koperasi terhadap PDB sektor UMKM (%) 	 Stakeholder Utama <ul style="list-style-type: none"> ● Kemendesa PDTT ● Bappenas ● KemenKopUKM ● Pemda ● LSM lokal
--	---	--

Fungsi Pemerintah

Mitra strategis koperasi

 Cara yang Dapat Dilakukan <ul style="list-style-type: none"> ● Skema pendampingan adaptif berbasis wilayah ● Evaluasi koperasi berbasis partisipasi anggota ● Exit strategy jelas 	 Indikator Kuantitatif <ul style="list-style-type: none"> ● Koperasi didampingi berbasis kebutuhan (unit/tahun) ● Evaluasi tahunan koperasi (%) ● Rasio intervensi langsung pemerintah (target: menurun) 	 Stakeholder Utama <ul style="list-style-type: none"> ● KemenKopUKM ● Pemda ● Lembaga pendamping ● CSO
---	---	--

Fungsi Pemerintah

Pembuka akses pasar (market access)

 Cara yang Dapat Dilakukan <ul style="list-style-type: none"> ● Afirmasi koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ● Link koperasi dengan offtaker industri ● Fasilitasi ekspor 	 Indikator Kuantitatif <ul style="list-style-type: none"> ● Koperasi masuk e-katalog pemerintah ● Volume transaksi koperasi-BUMN ● Koperasi ekspor (unit/tahun) ● Jumlah MoU koperasi-swasta 	 Stakeholder Utama <ul style="list-style-type: none"> ● LKPP ● KemenKopUKM ● Kemenperdag ● KemenBUMN ● Asosiasi bisnis
--	--	---



Belajar dari Koperasi Jepang Zen-Noh³⁸, Inisiatif Organik Rakyat Menjadi Koperasi Terbesar di Dunia

Koperasi Zen-Noh (*National Federation of Agricultural Cooperative Association*) berdiri tahun 1972 dan pada tahun 1977 memiliki 4.329 anggota dari koperasi pertanian. Inisiatif dari bawah yang dimulai dari keinginan untuk memiliki alat produksi pertanian ini dibangun secara konsisten dan pendekatan yang terus melakukann perbaikan dari sisi manajerial, pengembangan bisnis, kolaborasi, dan manfaat nyata untuk anggota. Sekarang, koperasi ini memiliki nilai penjualan di semua lini bisnisnya hingga JPY4,9 triliun atau lebih dari Rp558 triliun per tahun dalam sektor usaha pertanian, peternakan, perkebunan, pupuk, penjualan besar-retail modern, hingga energi.

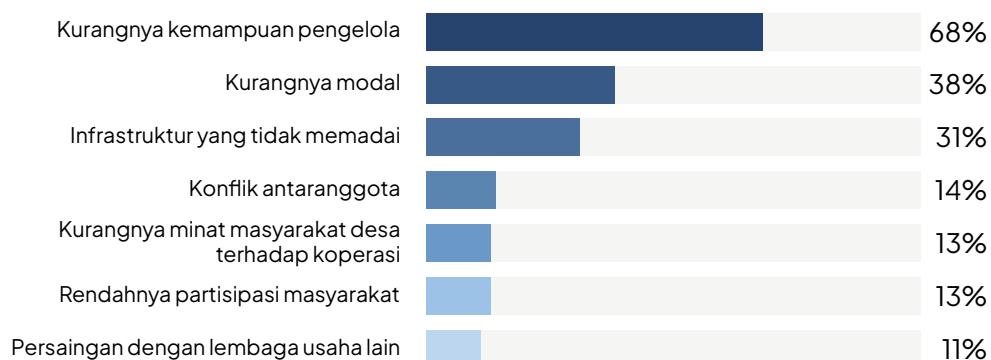
Koperasi ini bahkan mampu mempekerjakan 28.351 karyawan dan memiliki penjualan bersih pada 7 sektor utama pangannya senilai JPY870 miliar atau lebih dari Rp99 triliun/tahun. Ekspansi ke 28 titik bisnis di luar negeri dan kerja sama dengan pemerintah dilakukan dalam level yang setara karena kontribusi dan kekuatan Zen-Noh yang besar dalam perekonomian Jepang.

³⁸ Zen-Noh. 2024. Zen-Noh Report. <https://www.zennoh.or.jp/english/book/report/2024.pdf>

SDM Koperasi Harus Naik Kelas

Kualitas pengelolaan menentukan keberlanjutan dan daya saing koperasi dalam jangka panjang. Namun justru banyak koperasi masih dikelola oleh pengurus yang belum memiliki kapasitas manajerial memadai, baik dalam hal perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, maupun pelayanan anggota. Lemahnya profesionalisme ini kerap berujung pada tata kelola yang tidak transparan, minim akuntabilitas, serta tidak responsif terhadap dinamika pasar. Kondisi ini turut berkontribusi pada rendahnya kepercayaan anggota dan masyarakat, yang pada gilirannya memperparah masalah kurangnya modal karena simpanan dan partisipasi anggota menurun. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, baik fisik maupun digital, menjadi hambatan tambahan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akses pasar.

Gambar 22.
Inventaris Masalah Pokok yang dihadapi Koperasi di Desa

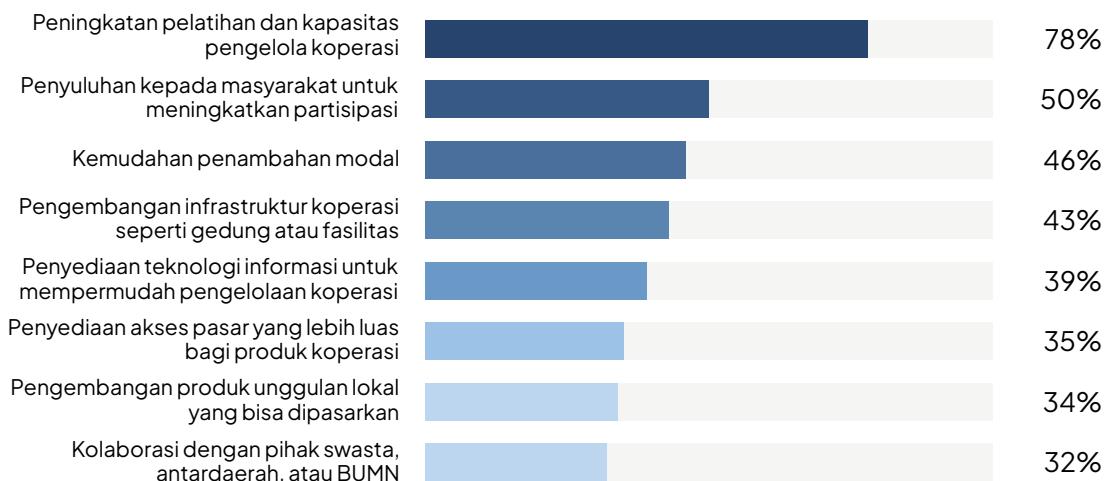


Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, “Apa masalah utama yang dihadapi koperasi di desa Anda saat ini?”. Opsi jawaban meliputi “Kurangnya kemampuan pengelola”, “Rendahnya partisipasi masyarakat”, “Infrastruktur yang tidak memadai”, “Kurangnya minat masyarakat desa terhadap koperasi”, “Kurangnya modal”, “Konflik antaranggota”, dan “Persaingan dengan lembaga usaha lain”. Responden dapat memilih lebih dari satu opsi serta juga dapat memberi jawaban di luar opsi yang tersedia.

Hasil survei demikian semakin menunjukkan adanya ketidaksiapan kapasitas pengelola. Sebanyak 67,59% responden menganggap “kurangnya kemampuan pengelolaan” sebagai masalah utama koperasi. Hal ini menegaskan bahwa tantangan terbesar koperasi terletak pada aspek sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Maka, peningkatan kemampuan pengelola dirasa lebih fundamental dibandingkan kekurangan modal (37,96%) dan hambatan infrastruktur (31,48%).

Gambar 23.

Pemetaan Solusi Efektif dalam Pengembangan Koperasi di Desa



Sumber: Penulis. N= 108. Responden ditanyakan, "Apa solusi yang lebih tepat menurut Anda untuk pengembangan koperasi di desa?". Opsi jawaban meliputi "Peningkatan pelatihan dan kapasitas pengelola koperasi", "Kolaborasi dengan pihak swasta, antardaerah, atau BUMN", "Pengembangan infrastruktur koperasi seperti gedung atau fasilitas", "Kemudahan penambahan modal", "Penyediaan akses pasar yang lebih luas bagi produk koperasi", "Pengembangan produk unggulan lokal yang bisa dipasarkan", "Fasilitasi akses permodalan dari lembaga keuangan mikro atau bank", "Penyediaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan koperasi", dan "Penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi". Responden dapat memilih lebih dari satu opsi serta juga dapat memberi jawaban di luar opsi yang tersedia.

Mayoritas responden (77%) menilai bahwa cara terbaik untuk mengembangkan koperasi adalah dengan meningkatkan pelatihan dan kemampuan pengelolanya. Selain itu, separuh responden juga menyoroti pentingnya penyuluhan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi juga pada keterlibatan aktif anggota dan pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi. Edukasi ini bisa menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi.

Di sisi lain, kemudahan menambah modal juga dianggap penting oleh 46% responden. Namun, akses modal hanya akan bermanfaat jika pengelolaan koperasi sudah kuat, agar dana yang ada bisa digunakan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beragam ide dan kebutuhan di desa, namun prioritas pemerintah pusat ke depan perlu mengarah pada empat intervensi. Pertama, Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, akses transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan sampai jenjang SMA, teknologi informasi, dan sistem irigasi untuk desa penghasil produk pertanian.



Kebutuhan pembangunan di desa yang selalu diminta warga meliputi pembangunan SDM dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan jalan usaha tani dan alat-alat pertanian, serta modal untuk membangun pariwisata.

Perangkat Desa di Bali

Kedua, dukungan sektor pertanian dan ekonomi lokal seperti bantuan alat pertanian modern, stabilitas harga komoditas hingga penguatan BUMDes untuk mendorong eksplorasi potensi desa seperti wisata dan produk lokal agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebagaimana penjelasan responden bahwa

“

Koperasi dapat menentukan harga. Ketika harga dapat lebih rendah dari harga pasaran, maka masyarakat menikmati persaingan usaha secara luas karena ada komparasi harga, tetapi tidak dengan usaha-usaha yang dimiliki masyarakat.

Perangkat Desa di Jambi

Ketiga, optimalisasi dana desa dalam alokasi kebutuhan spesifik desa dan merata. Selama ini orientasi program hanya terfokus pada kondisi pulau Jawa, sementara desa-desa di luar pulau Jawa masih kurang tersentuh.

“

Kita di Papua masih butuh pembangunan. Kalau kita terima Kopdes ini nantinya program perumahan ini akan terhambat padahal masyarakat butuh itu. Total anggaran kami cuma Rp1,5 miliar dan hasil musyawarah sudah tentukan pos anggaran. Pembangunan saja hanya tinggal 100 juta setelah dikurangi honor kader.

Perangkat Desa di Papua Barat

Gambar 24.

Analisis Gap Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa



Koperasi dapat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)

Pemerintah sebaiknya mengalokasikan triliunan rupiah untuk memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) khusus pelatihan koperasi sebagai strategi penciptaan lapangan kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan langsung mengucurkan dana dalam skala besar. Model pelatihan yang diterapkan pun bisa bervariasi, dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, siap usaha, dan memiliki keterampilan relevan dengan pasar hari ini.

Kerja sama dengan BLK lebih masuk akal dan efektif jika ada kemauan dari pemerintah. BLK relatif sudah mapan sebagai lembaga pelatihan vokasi milik pemerintah. BLK umumnya telah dilengkapi dengan fasilitas pelatihan, peralatan praktik, serta instruktur bersertifikasi yang memahami standar industri. Selain itu, BLK juga memiliki jaringan kemitraan dengan sektor industri dan dunia kerja, yang memungkinkan adanya sinkronisasi antara pelatihan dengan kebutuhan riil pasar tenaga kerja

Tabel 12.
Skema Kerjasama Multipihak

Skema	Kerja sama
Co-funding Pelatihan	Koperasi menyediakan dana insentif/pembiayaan kecil (misalnya transportasi, makan, alat praktik), sementara BLK menyediakan fasilitator dan kurikulum.
Kurikulum Bersama (Demand-driven)	BLK menyusun kurikulum bersama koperasi berdasarkan kebutuhan riil unit usaha koperasi (misal: agroindustri, kerajinan, digitalisasi usaha).
Tempat Magang/ Praktik di Koperasi	Setelah pelatihan di BLK, peserta magang di unit usaha koperasi (misal: ritel koperasi, pengolahan hasil pertanian).
Pelatihan Berbasis Masyarakat (Community-based Training)	BLK melatih pelatih lokal (TOT), lalu koperasi menyebarkan pelatihan ini di komunitas dengan metode gotong-royong.
Pusat Inkubasi Usaha	Koperasi menjadi hub inkubasi pasca-pelatihan: menyediakan akses modal, pasar, mentoring usaha. BLK mendampingi aspek teknis.
Sertifikasi Kompetensi	BLK sebagai lembaga sertifikasi kompetensi (LSP), dan koperasi membantu memfasilitasi peserta mendapatkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Tabel 13.
Variasi Pelatihan Kontekstual

Jenis Pelatihan	Aktivitas
Blended Learning	Kombinasi tatap muka di BLK/koperasi dengan modul daring (pakai WhatsApp, video, modul PDF, atau platform <i>Learning Management System-LMS</i> yang sederhana).
Pelatihan Modular Cepat (Short-Course)	Durasi 3-7 hari per modul, fokus pada satu keterampilan praktis (misal: pembuatan sabun herbal, desain konten digital).
Bootcamp Kewirausahaan	1-2 minggu intensif, peserta langsung membuat prototipe usaha, belajar <i>pitching</i> , akuntansi sederhana, dan pemasaran digital.
Mentoring Berbasis Proyek	Pelatihan berbasis proyek nyata koperasi. Misal: peserta membuat sistem inventori digital untuk koperasi.
Mobile Training Unit (MTU)	BLK mobile ke desa binaan koperasi, dengan alat praktik portabel. Cocok untuk daerah 3T.

Tema Pelatihan	Relevansi	Konten Utama
Digitalisasi UMKM Koperasi	Sesuai tren e-commerce & fintech	Manajemen toko online, QRIS, pembukuan digital, Canva, WhatsApp bisnis.
Ekonomi Hijau dan Ekwirausahaan	Dukung transisi ekonomi hijau	Budidaya maggot, pupuk organik, sabun ramah lingkungan, urban farming.
Desain Produk dan Kemasan Kreatif	Tingkatkan daya jual produk lokal	Desain label, teknik packaging, riset pasar, branding berbasis lokalitas.
Perawatan Motor Listrik dan Instalasi Panel Surya	Pasar baru dan kebijakan transisi energi	Pelatihan teknisi dasar motor listrik, solar panel kecil untuk rumah/dusun.
Pelatihan Barista Lokal / Foodpreneur Desa	Tren food & beverage yang tumbuh	Olahan kopi lokal, minuman sehat herbal, modal kecil usaha kuliner.
Manajemen Keuangan dan Dana Bergulir Koperasi	Perluasan akses pembiayaan	Simulasi pembukuan koperasi, pengelolaan dana bergulir, literasi keuangan.
Keterampilan Layanan (Soft skills)	Diperlukan semua sektor	Komunikasi pelanggan, etika kerja, kepemimpinan muda, presentasi usaha.

Investasi Indonesia dalam pelatihan pembukaan lapangan kerja lebih efektif dan tepat sasaran daripada menggelontorkan APBN secara serampangan untuk Kopdes MP. Investasi pada pelatihan tersebut berbiaya jauh lebih rendah dan secara langsung meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar yang berkembang, sehingga mengurangi kesenjangan antara kemampuan pekerja dan permintaan industri.

Tabel 14.
Rencana Pelatihan Pembukaan Lapangan Kerja

	Komponen Anggaran Infrastruktur dan Peralatan Deskripsi Renovasi ruang pelatihan, alat kerja, IT, media pembelajaran	Estimasi Biaya per Tahun (Rp) 3 miliar
	Komponen Anggaran Biaya Operasional Deskripsi Listrik, air, internet, perawatan alat, administrasi	Estimasi Biaya per Tahun (Rp) 1 miliar
	Komponen Anggaran Gaji Instruktur dan Staf Deskripsi Tenaga ahli pelatihan koperasi, manajemen, administrasi	Estimasi Biaya per Tahun (Rp) 2 miliar
	Komponen Anggaran Pengembangan Kurikulum Pelatihan Deskripsi Riset, penyusunan modul, evaluasi pembelajaran	Estimasi Biaya per Tahun (Rp) 0,5 miliar
	Komponen Anggaran Program Pendampingan Usaha Deskripsi Konsultasi usaha koperasi pasca pelatihan, mentoring	Estimasi Biaya per Tahun (Rp) 1 miliar
	Komponen Anggaran Dana Pelatihan Peserta Deskripsi Subsidi biaya pelatihan peserta (misal untuk 200 peserta/BLK)	Estimasi Biaya per Tahun (Rp) 1 miliar

Dengan asumsi terdapat 4.282 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia³⁹, masing-masing menerima alokasi anggaran sebesar Rp 8,5 miliar per tahun, maka total investasi pemerintah untuk mendukung pelatihan koperasi mencapai Rp 36,4 triliun per tahun ($4.282 \text{ BLK} \times \text{Rp } 8,5 \text{ miliar}$). Apabila setiap BLK mampu melatih sekitar 500 peserta dalam setahun, sehingga total peserta pelatihan nasional mencapai 2.141.000 orang (4.282×500).

Dari total peserta tersebut, diasumsikan terdapat 130.119 koperasi aktif⁴⁰. Selanjutnya, dengan adanya pelatihan intensif, setiap koperasi diestimasi mampu menciptakan rata-rata 20 lapangan kerja baru, sehingga total lapangan kerja baru yang tercipta dari seluruh koperasi mencapai 2.602.380 posisi ($130.119 \text{ koperasi} \times 20 \text{ lapangan kerja}$).

Lewat pengembangan BLK, dengan asumsi semua lapangan kerja baru yang tercipta dari koperasi ini langsung menyerap tenaga kerja pengangguran saat ini tanpa hambatan, maka pengangguran di Indonesia sebesar 7,28 juta orang dapat terserap dalam waktu kurang lebih 2,8 tahun atau sekitar 3 tahun melalui pelatihan dan pengembangan koperasi di BLK secara optimal.

Program ini memakan anggaran Rp36 triliun per tahun dan dampaknya bisa lebih masif terhadap penciptaan lapangan kerja ketimbang penggelontoran dana APBN mencapai Rp240 triliun per tahun.

³⁹ Andayani, Dwi. 2024. Di Hadapan Wapres, Menaker Laporkan Telah Dibangun 4.282 Balai Latihan Kerja. <https://news.detik.com/berita/d-7230279/di-hadapan-wapres-menaker-laporkan-telah-dibangun-4-282-balai-latihan-kerja> (Diakses pada 23 Mei 2025).

⁴⁰ VOI. 2024. Jumlah Koperasi Aktif hingga 2024 jadi 130.119. <https://voi.id/ekonomi/424057/jumlah-koperasi-aktif-hingga-2024-jadi-130-119> (Diakses 23 Mei 2025).

“

*Koperasi harusnya gerakan rakyat,
bukan dikooptasi oleh pusat.*

*Jika skema Kopdes Merah Putih
terus dipaksakan meski sarat
risiko korupsi, memicu konflik sosial,
dan menggerus kemandirian
ekonomi desa, maka pilihan
paling rasional saat ini adalah
membatalkannya, menghentikan
rencana penarikan dana desa
sebagai sumber cicilan,
atau merombak total model Kopdes MP
menjadi partisipatif, transparan,
dan benar-benar berbasis
pada kebutuhan warga desa.*



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id